

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Purworejo merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah, yang terletak pada posisi antara 109° 47' 28" - 110° 8' 20" Bujur Timur dan 7° 32' - 7° 54" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Purworejo adalah 1.034,82 km² yang terdiri dari $\pm 2/5$ daerah dataran dan $\pm 3/5$ daerah pegunungan dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah utara	: Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang
Sebelah timur	: Kabupaten Kulon Progo Propinsi DIY
Sebelah selatan	: Samudra Indonesia
Sebelah barat	: Kabupaten Kebumen

2. Topografi

Kondisi kemiringan lereng atau kelerengan Kabupaten Purworejo dapat dibedakan menjadi empat (4) kategori yaitu:

- a) Kemiringan 0 – 2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah Kabupaten Purworejo,
- b) Kemiringan 2 – 15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen,
- c) Kemiringan 15 – 40% meliputi bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo,
- d) Kemiringan > 40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh.

Posisi ketinggian Kabupaten Purworejo berkisar antara 0 meter sampai dengan 1.064 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi Kabupaten Purworejo secara umum adalah sebagai berikut :

- a) Bagian selatan dan barat merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 25 meter di atas permukaan air laut.
- b) Bagian utara dan timur merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25 – 1064 meter di atas permukaan air laut.

3. Klimatologis

Kondisi iklim suatu daerah sangat berpengaruh pada potensi daerah bersangkutan, baik dalam potensi sumber daya alam maupun dalam potensi bencana alam. Kabupaten Purworejo beriklim tropis dengan dua musim dalam setahunnya yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata suhu udara di Purworejo antara 19–28°C dengan curah hujan rata-rata per tahun

berkisar antara 620 mm/tahun hingga 3.720 mm/tahun. Kondisi curah hujan yang relative dengan intensitas tinggi sering menyebabkan di daerah-daerah potensi banjir dan longsor terkena bencana banjir dan tanah longsor.

4. Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Purworejo dapat dirinci menjadi bahasan mengenai lithologi/batuan, stratigrafi dan struktur geologi. Ketiga aspek geologi tersebut penting kaitannya dengan beberapa fenomena alam khususnya kebencanaan seperti longsor, banjir maupun kekeringan. Proporsi litologi batuan Kabupaten Purworejo berupa batuan sedimen dan perselingan batuan gunung api sebesar 60,1% terdapat di bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo pada daerah dengan topografi tinggi dan 39,9% aluvium tersebar pada daerah dengan topografi rendah di bagian selatan dan barat Kabupaten Purworejo. Susunan batuan/stratigrafi yang menyusun wilayah Kabupaten Purworejo mengikuti tata stratigrafi pada Pegunungan Serayu Utara yang berada di bagian utara dan Pegunungan Menoreh yang berada di bagian timur. Kabupaten Purworejo sendiri memiliki empat bentuk lahan asal proses, meliputi bentuk lahan asal proses struktural, bentuk lahan asal proses fluvial, bentuk lahan asal proses marin dan bentuk lahan asal proses denudasional.

5. Hidrologi

Kondisi hidrologi yang dapat dilihat dari potensi air tanah dan keberadaan air permukaan satu daerah adalah tidak sama dengan daerah lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang sama. Hal ini disebabkan kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda.

Kabupaten Purworejo memiliki potensi air yang berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Terdapat beberapa sungai yang mengalir dan bermuara di Samudera Indonesia. Sungai-sungai ini termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto, Cokroyasan dan Wawar. Hulu-hulu sungai tersebut umumnya berada di bagian timur dan utara Kabupaten Purworejo.

6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kabupaten Purworejo dibagi menjadi dua kategori yaitu lahan kering seluas 72.854,80 Ha atau 70,40 % dan tanah sawah seluas 30,626,97 Ha atau 29,60%. Lahan kering terdiri dari 10.116,50 Ha berupa tanah bangunan dan halaman sekitarnya, 51.598,14 Ha berupa tegal/kebun/ladang/huma, 6.857,88 Ha berupa hutan negara, dan sisanya berupa padang rumput, tambak, tanah lainnya. Luas sawah beririgasi adalah 27.677,14 Ha, sedangkan sawah tadah hujan seluas 2.949,83 Ha. Dinamika penggunaan lahan di Kabupaten Purworejo agak kurang terkendali. Sebagian besar perubahan yang terjadi berupa alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian seperti untuk perumahan dan permukiman.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Menurut Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Purworejo 2011-2031, penetapan kawasan strategis pada wilayah kabupaten, meliputi :

1. dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - (1) Kawasan Perkotaan Purworejo – Kutoarjo yang dapat dikembangkan menjadi kawasan Aglomerasi Purworejo - Kutoarjo berbasis jasa, perdagangan, dan industri meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Purworejo;
 - b. kawasan koridor jalan ruas Purworejo-Kutoarjo; dan
 - c. kawasan perkotaan Kutoarjo.
 - (2) Kawasan Perkotaan Purwodadi, dapat dikembangkan menjadi pusat layanan sektor jasa, perdagangan, transportasi, dan keuangan
 - (3) Kawasan Perkotaan Kemiri, dapat dikembangkan menjadi pusat layanan sektor jasa, perdagangan, dan keuangan
 - (4) Kawasan Bahari Terpadu (KBT), dapat dikembangkan pada kawasan pesisir selatan Kabupaten seluas kurang lebih 10.650 (sepuluh ribu enam ratus lima puluh) hektar, termasuk wilayah laut sejauh 4 (empat) mil dari garis pantai yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah meliputi:
 - a. Kecamatan Grabag;
 - b. Kecamatan Ngombol; dan
 - c. Kecamatan Purwodadi.
 - (5) Kawasan Agropolitan, terdiri atas:
 - a. pengembangan kawasan agropolitan Bagelen meliputi:
 - 1) Kecamatan Bagelen;
 - 2) Kecamatan Purwodadi;
 - 3) Kecamatan Kaligesing; dan
 - 4) Kecamatan Ngombol.
 - b. pengembangan kawasan agropolitan Kuto Bumi Baru meliputi:
 - 1) Kecamatan Kutoarjo;
 - 2) Kecamatan Butuh;
 - 3) Kecamatan Kemiri;
 - 4) Kecamatan Pituruh;
 - 5) Kecamatan Bruno; dan
 - 6) Kecamatan Grabag.
 - (6) Kawasan koridor perbatasan Purwokulon yang dapat dikembangkan berbasis pertanian, pariwisata, jasa, dan perdagangan di Kecamatan Kaligesing.
 - (7) Kawasan perbatasan dengan desa-desa yang berbatasan dengan Kabupaten lainnya, meliputi:
 - a. Desa Dadirejo di Kecamatan Bagelen;
 - b. Desa Jogoboyo di Kecamatan Purwodadi;
 - c. Desa Sedayu di Kecamatan Loano;
 - d. Desa Ngasinan di Kecamatan Bener;
 - e. Desa Cacaban Lor di Kecamatan Bener;

- f. Desa Tegalsari di Kecamatan Bruno;
 - g. Desa Brengkol di Kecamatan Pituruh;
 - h. Desa Wironatan di Kecamatan Butuh; dan
 - i. Desa Nambangan di Kecamatan Grabag.
- 2. dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
 - a. Kawasan situs prasasti Kayu Arahiwang di Desa Borowetan Kecamatan Banyuurip;
 - b. Kawasan alun-alun Purworejo dan sekitarnya;
 - c. Kawasan alun-alun Kutoarjo dan sekitarnya; dan
 - d. Kawasan Petilasan WR. Supratman di Desa Somongari Kecamatan Kaligesing.
- 3. dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 - a. kawasan DAS meliputi:
 - 1) bagian hulu DAS Bogowonto;
 - 2) bagian hulu DAS Cokroyasan; dan
 - 3) bagian hulu DAS Wawar.
 - b. kawasan pegunungan Menoreh meliputi:
 - 1) Kecamatan Bagelen;
 - 2) Kecamatan Kaligesing;
 - 3) Kecamatan Loano; dan
 - 4) Kecamatan Bener.
 - c. kawasan pegunungan Serayu Selatan meliputi:
 - 1) Kecamatan Gebang;
 - 2) Kecamatan Bruno;
 - 3) Kecamatan Pituruh; dan
 - 4) Kecamatan Kemiri.
 - d. kawasan pantai berhutan bakau meliputi:
 - 1) Kecamatan Grabag;
 - 2) Kecamatan Ngombol; dan
 - 3) Kecamatan Purwodadi.
 - e. kawasan TPA Sampah Gunung Tumpeng di Desa Jetis Kecamatan Loano.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana, terdiri atas:

- a. kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi: Kecamatan Loano; Kecamatan Bruno; Kecamatan Bener; Kecamatan Kaligesing; Kecamatan Gebang; Kecamatan Bagelen; Kecamatan Purworejo; Kecamatan Kutoarjo; Kecamatan Pituruh; dan Kecamatan Kemiri.
- b. kawasan rawan bencana banjir meliputi: Kecamatan Grabag; Kecamatan Butuh; Kecamatan Bagelen; Kecamatan Ngombol; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Kutoarjo; dan Kecamatan Pituruh;

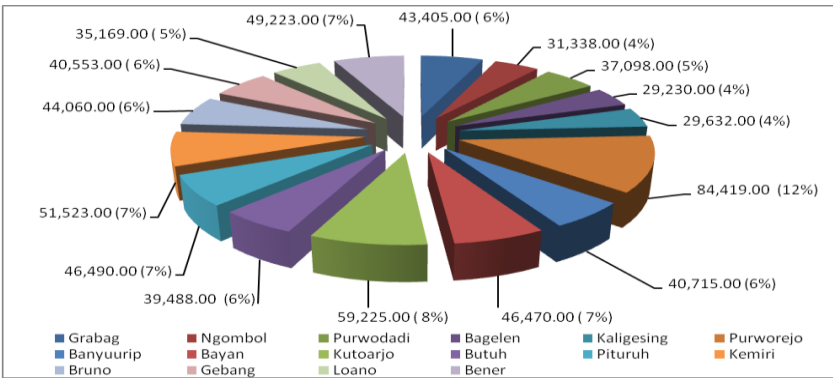
- c. kawasan rawan bencana gelombang pasang meliputi: Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Ngombol; dan Kecamatan Grabag.; dan
- d. kawasan rawan bencana kekeringan meliputi: Kecamatan Bruno; Kecamatan Pituruh; Kecamatan Kemiri; Kecamatan Gebang; Kecamatan Bener; Kecamatan Loano;Kecamatan Bagelen; Kecamatan Kaligesing; Kecamatan Grabag; Kecamatan Ngombol; dan Kecamatan Purwodadi.

2.1.1.4 Demografi

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo menurut hasil Sensus Penduduk pada bulan Mei 2010 adalah 694.404 jiwa. Sedangkan kondisi pada akhir tahun 2014 adalah 708.038 jiwa. Dilihat dari persebarannya, Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 12 % dan 8% dari jumlah penduduk Kabupaten Purworejo. Adapun Prosentase Persebaran Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2014 sebagaimana tersaji pada gambar berikut.

Gambar 2.1
 Prosentase Persebaran Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2014

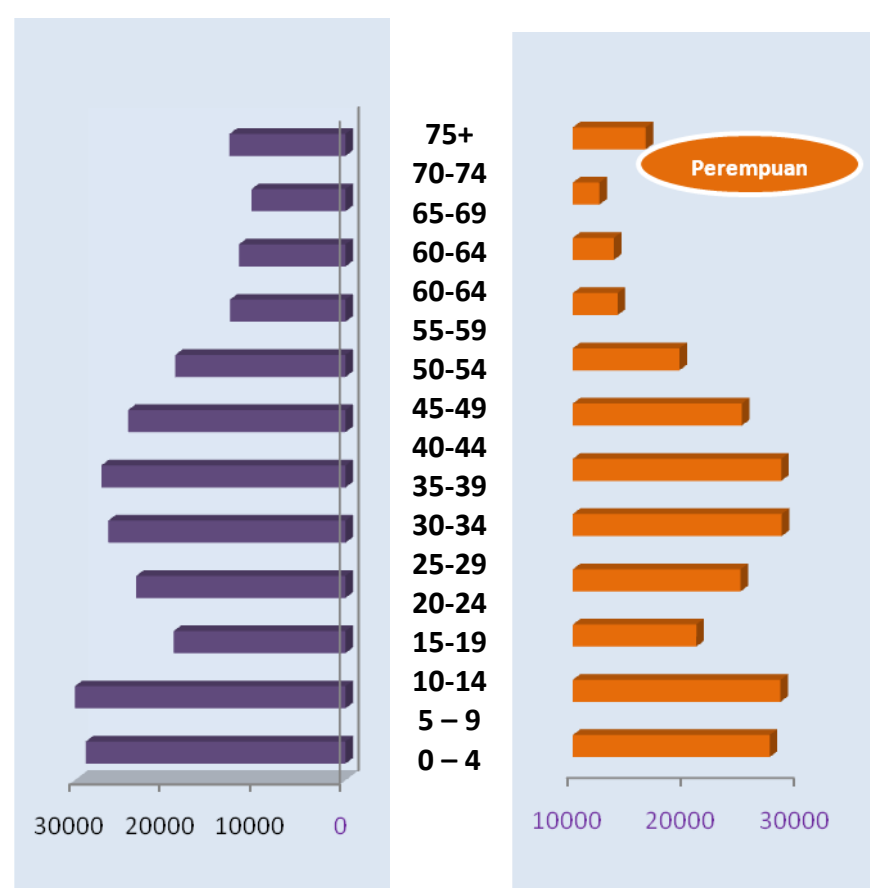


(sumber : Kabupaten Purworejo Dalam Angka, BPS, 2015)

2. Usia

64,97% Penduduk Purworejo berusia antara 15–64 Tahun. Rasio beban ketergantungan di Purworejo tahun 2014 adalah 35,03. Artinya 100 penduduk usia produktif (15-64) rata-rata menanggung beban 35 penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 keatas). Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2014 sebagaimana tersaji pada gambar 2.2.

Gambar 2.2.
Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2014



(sumber : Kabupaten Purworejo Dalam Angka, BPS, 2015)

Tabel 2.1.
Perkembangan Besarnya Rasio Beban Ketergantungan

Kelompok Umur	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
0 sampai dengan 14	177.021	177.269	173.164	172.112	170.195
15 sampai dengan 64	444.654	445.226	457.856	457.369	460.005
65 keatas	73.802	73.905	77.563	76.002	77.838
Rasio Beban Ketergantungan (%)	56,42	56,41	54,74	54,25	53,92

Sumber : Kabupaten Purworejo Dalam Angka berbagai tahun terbitan (diolah)

Untuk kabupaten Purworejo tergolong piramida penduduk muda yang berarti angka kelahiran masih lebih besar daripada angka kematian.

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Rasio ketergantungan di bagi menurut usia, tua dan muda:

- 1) Rasio Ketergantungan Muda adalah perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15 – 64 tahun.
- 2) Rasio Ketergantungan Tua adalah perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun.

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu Negara atau wilayah, apakah tergolong Negara atau wilayah maju atau Negara atau wilayah yang sedang berkembang. Semakin tingginya persentase menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Berkaitan dengan angka beban ketergantungan Kabupaten Purworejo pada kisaran angka 50-55, menunjukkan kondisi yang hampir seimbang yang berarti jumlah penduduk produktif masih menanggung penduduk non produktif sebesar $\pm 5\%$.

e) **Kepadatan Penduduk**

Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk dalam satuan wilayah tertentu. Angka kepadatan penduduk kasar adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk dalam satuan wilayah tertentu. Satuan yang biasa digunakan untuk menggambarkan angka kepadatan adalah orang/hektar atau orang/km². Besarnya angka kepadatan penduduk kasar kabupaten Purworejo pada tahun 2014 sebesar 684,22 orang / km² luas wilayah.

Sebagian besar penduduk Purworejo terkonsentrasi di kecamatan Purworejo, Kutoarjo dan Bayan masing masing sebesar 1.601,25; 1.575,37 dan 1.075,41 orang/km² (*sumber : Kabupaten Purworejo dalam angka, BPS, 2015*). Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Kaligesing dengan kepadatan penduduk sebesar 396,53 orang/km² dan Kecamatan Bruno dengan kepadatan penduduk sebesar 406,34 orang/km². Dua kecamatan tersebut memang merupakan daerah dengan kondisi geografis berupa pegunungan yang sebagian wilayahnya memiliki hutan yang cukup luas.

f) Laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Purworejo dari tahun 2013-2014 sebesar 0.3954%. Pertumbuhan penduduk Kecamatan yang di atas rata-rata Kabupaten Purworejo adalah Kecamatan Grabag, Purwodadi, Bagelen, Purworejo, Banyuurip, Bayan, Gebang. (sumber : *Purworejo Dalam Angka, BPS, 2015*).

g) Mata pencaharian penduduk

Pekerjaan menurut lapangan usaha penduduk Purworejo umur 15 tahun ke atas yang bekerja sebagian besar didominasi sektor pertanian (38.85%), kemudian diikuti sector perdagangan (24.98%), sector jasa (15,85%), industri (9,54%), komunikasi (3,23%), keuangan (1,37%), pertambangan dan penggalian (0.98%) dan listrik, gas dan air (0.01%). (Sumber : *Kabupaten Purworejo Dalam Angka, BPS, 2015*).

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu bagian dari sistem neraca ekonomi regional yang di dalamnya merekam hasil-hasil dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu (satu tahun). PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun tertentu sebagai tahun dasar, yaitu dalam periode tahun sampai dengan tahun 2014 ini menggunakan tahun dasar tahun 2000.

Dalam kurun waktu tahun 2010-2014, PDRB Kabupaten Purworejo atas harga berlaku adalah 6.466.490,69 juta rupiah tahun 2010, meningkat menjadi 7.143.081,12 juta rupiah di tahun 2011, meningkat menjadi 7.871.108,76 juta rupiah di tahun 2012, meningkat menjadi 8.733.568,00 juta rupiah di tahun 2013 dan pada tahun 2014 mencapai 9.644.686.07 juta rupiah. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan mencapai 3.016.597,82 juta rupiah di tahun 2010 menjadi 3.168.113,50 juta rupiah di tahun 2011, 3.327.675,40 juta rupiah di tahun 2012 , 3.493.600,85 juta rupiah di tahun 2013 dan menjadi 3.668.253,47 juta rupiah di tahun 2014.

2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo pada tahun 2010 s.d. tahun 2012 adalah dari 5,01%, meningkat menjadi 5,02% dan meningkat lagi menjadi 5,04% pada tahun 2012, tetapi menurun menjadi 4,99% pada tahun 2013,

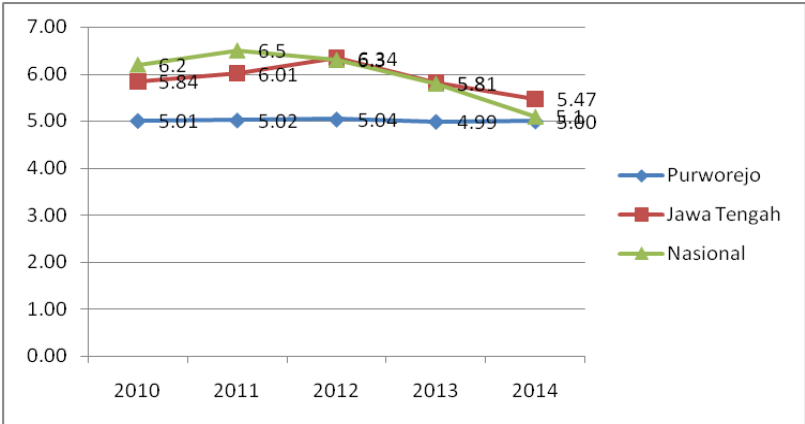
meningkat lagi menjadi 5,00% pada tahun 2014. Kondisi di tahun 2014 tersebut masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah yang mencapai 5,47%. Demikian juga jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 5,1%, Kabupaten Purworejo masih berada di bawah rata-rata Nasional, yang dapat dilihat pada tabel 2.2. dan gambar 2.3.

Tabel 2.2.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan
Indonesia Tahun 2010-2014
(Berdasar PDRB tahun dasar 2000)

Cakupan Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014
Kabupaten Purworejo	5,01	5,02	5,04	4,99	5.00
Provinsi Jawa Tengah	5,84	6,01	6,34	5,81	5.47
Indonesia	6,10	6,50	6,23	5,17	5.1

(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2011-2015).

Gambar 2.3.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo Tahun 2010 – 2014 (%)



(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) & Bappeda Purworejo, 2010-2014, diolah)

Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Purworejo, pada tahun 2010 semua sektor ekonomi di Kabupaten Purworejo menunjukkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan terendah dialami oleh sektor pertanian yang hanya mencapai 3,76% dan pertumbuhan tertinggi oleh sektor jasa yang mencapai 6,90%. Pada tahun 2011 pertumbuhan terendah pada sektor pertanian yang hanya mencapai 2,30% sedangkan pertumbuhan tertinggi oleh sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 7,64%. Pada tahun 2012 pertumbuhan terendah pada sektor pertambangan dan penggalian yang hanya mencapai 2,71% dan pertumbuhan tertinggi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 6,41%. Pada tahun 2013, pertumbuhan terendah pada sektor pertanian yang mencapai 2,98% dan pertumbuhan tertinggi pada sektor Keuangan, persewaaan dan jasa perusahaan yang mencapai 7,33%. Sedangkan pada tahun 2014 pertumbuhan

terendah pada sektor pertanian yaitu sebesar 1,45% dan pertumbuhan tertinggi pada sektor pengangkutan dan komunikasi 8,93%.

Kondisi tersebut menunjukkan trend positif tiap sektor dimana terjadi pergeseran lebih merata, artinya pertumbuhan distribusi nilai tambah barang dan jasa yang terjadi sepanjang tahun 2010-2012 relatif dinamis.

Tabel 2.3.
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2014
(Berdasar PDRB Tahun Dasar 2000)

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian	3,76	2,30	3,51	2,98	1.45
Pertambangan dan Penggalian	3,98	3,08	2,71	3,01	3.52
Industri Pengolah	4,09	5,76	4,80	5,70	5.69
Listrik, Gas dan Air Bersih	6,66	4,51	5,38	6,56	5.29
Bangunan	5,17	5,87	6,07	5,92	4.68
Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,63	6,48	6,41	6,39	7.14
Pengangkutan dan Komunikasi	5,70	7,64	5,78	6,09	8.93
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,39	6,76	6,01	7,33	7.16
Jasa-Jasa	6,90	6,79	5,95	5,52	6.77
PDRB	5,01	5,02	5,04	4,99	5,00

(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2011-2014)

3. Struktur Ekonomi Kabupaten Purworejo

Struktur ekonomi di Kabupaten Purworejo tahun 2011-2014 menurut lapangan usaha dapat dilihat dalam tabel 2.4.

Perubahan struktur ekonomi tersebut perlu dilihat melalui data empiris dalam kurun waktu yang relatif panjang untuk mengetahui tingkat pergeseran tiap sektornya. Pergeseran dalam struktur ekonomi di Kabupaten Purworejo jika diperbandingkan antara tahun 2005 dengan tahun 2014 pada tabel 2.4, maka terlihat bahwa selama periode tersebut peranan sektor pertanian sebagai penopang struktur ekonomi kabupaten mulai bergeser ke arah perdagangan dan industri. Dengan demikian pengembangan wilayah di Kabupaten Purworejo dengan memajukan sub sektor hilir sektor agribisnis relatif sudah dapat berjalan dengan baik.

Tabel 2.4.
Struktur Ekonomi Kabupaten Purworejo
Berdasar PDRB Tahun Dasar 2000

Sektor	2005 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
Pertanian	33,41	31,89	31,50	31,13	29,19
Pertambangan dan Penggalian	2,13	1,95	1,91	1,89	1,94
Industri Pengolah	10,22	9,74	9,75	9,81	10,34
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,78	0,78	0,77	0,78	0,78
Bangunan	5,75	5,88	5,84	5,78	5,87
Perdagangan, Hotel dan Restoran	16,58	16,59	16,90	17,18	17,63
Pengangkutan dan Komunikasi	6,93	6,89	6,88	6,86	7,07
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,14	6,31	6,33	6,42	6,52
Jasa-Jasa	18,07	19,97	20,12	20,14	15,38
PDRB	100	100	100	100	100

(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2006, 2012-2015)

Tabel 2.5.

Distribusi PDRB atas harga berlaku Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2014
(Berdasar PDRB Tahun Dasar 2000)

Sektor	Uraian	2011		2012		2013		2014	
		Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PERTANIAN	2,278,040.27	31.89	2,479,483.00	31.50	2,718,802.67	31.13	2,814,885.88	29.19
	a. Tanaman Bahan Makanan	1,549,810.69	21.70	1,690,245.52	21.47	1,843,567.94	21.11	1,850,720.22	19.19
	b. Tanaman Perkebunan	323,567.11	4.53	352,659.17	4.48	390,739.25	4.47	428,927.83	4.45
	c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	212,565.68	2.98	228,768.13	2.91	251,665.60	2.88	273,348.63	2.83
	d. Kehutanan	117,293.51	1.64	125,956.29	1.60	141,695.81	1.62	159,244.47	1.65
	e. Perikanan	74,803.29	1.05	81,853.88	1.04	91,134.06	1.04	102,644.73	1.06
2	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	139,521.32	1.95	150,179.48	1.91	164,723.51	1.89	187,541.98	1.94
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	695,514.96	9.74	767,237.11	9.75	856,780.85	9.81	997,666.26	10.34
	a. Industri Migas	0.00		0.00		0.00		0.00	
	b. Industri Tanpa Migas **)	695,514.96	9.74	767,237.11	9.75	856,780.85	9.81	997,666.26	10.34
	1. Makanan, Minuman & Tembakau	408,066.23	5.71	453,904.59	5.77	509,596.13	5.83	602,204.71	6.24
	2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	16,282.49	0.23	17,892.71	0.23	20,204.83	0.23	23,077.35	0.24
	3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	220,105.54	3.08	239,816.63	3.05	266,033.36	3.05	304,298.39	3.16
	4. Kertas dan Barang Cetak	7,421.98	0.10	7,805.18	0.10	8,643.03	0.10	10,223.98	0.11
	5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	7,788.61	0.11	8,436.21	0.11	9,142.96	0.10	10,166.95	0.11
	6. Semen & Brg. Galian bkn logam	25,090.59	0.35	28,081.76	0.36	30,929.44	0.35	34,002.55	0.35
	7. Logam Dasar Besi & Baja	0.00		0.00		0.00		0.00	
	8. Alat Angk., Mesin & Peral. nya	9,664.61	0.14	10,142.64	0.13	10,974.50	0.13	12,273.48	0.13
	9. Barang lainnya	1,094.92	0.02	1,157.39	0.01	1,256.59	0.01	1,418.86	0.01
4	LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	55,447.02	0.78	60,239.03	0.77	68,262.98	0.78	75,566.12	0.78
	a. Listrik	49,765.44	0.70	54,184.20	0.69	61,815.73	0.71	68,552.69	0.71
	b. Gas	0.00		0.00		0.00		0.00	
	c. Air Bersih	5,681.58	0.08	6,054.83	0.08	6,447.24	0.07	7,013.44	0.07
5	BANGUNAN	420,359.76	5.88	459,794.54	5.84	505,141.87	5.78	566,446.60	5.87
6	PERDAG, HOTEL & RESTORAN	1,184,838.53	16.59	1,330,439.80	16.90	1,500,746.56	17.18	1,699,883.73	17.63
	a. Perdagangan Besar & Eceran	991,606.27	13.88	1,117,878.62	14.20	1,262,692.27	14.46	1,431,895.35	14.85
	b. Hotel	5,625.50	0.08	6,191.26	0.08	6,976.35	0.08	7,859.58	0.08
	c. Restoran	187,606.76	2.63	206,369.92	2.62	231,077.93	2.65	260,128.81	2.70
7	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	492,053.98	6.89	541,906.27	6.88	598,873.09	6.86	682,269.82	7.07
	a. Pengangkutan	252,809.58	3.54	279,146.54	3.55	312,320.51	3.58	355,435.37	3.69
	1. Angkutan Rel	17,039.91	0.24	17,002.54	0.22	17,013.04	0.19	19,536.04	0.20
	2. Angkutan Jalan Raya	225,804.26	3.16	251,225.85	3.19	283,417.89	3.25	322,647.54	3.35
	6. Jasa Penunjang Angkutan	9,965.41	0.14	10,918.15	0.14	11,889.58	0.14	13,251.79	0.14
	b. Komunikasi	239,244.40	3.35	262,759.73	3.34	286,552.58	3.28	326,834.46	3.39
	1. Pos dan Telekomunikasi	227,990.24	3.19	250,752.78	3.19	273,570.10	3.13	312,182.98	3.24
	2. Jasa Penunjang Komunikasi	11,254.17	0.16	12,006.95	0.15	12,982.49	0.15	14,651.47	0.15
8	KEU, PERSEWAAN, & JS. PRSH.	451,007.08	6.31	497,979.27	6.33	561,103.95	6.42	628,601.27	6.52
	a. Bank	197,299.86	2.76	222,260.44	2.82	255,487.26	2.93	289,607.64	3.00
	b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	28,147.49	0.39	31,265.67	0.40	34,837.71	0.40	39,689.11	0.41
	d. Sewa Bangunan	129,532.22	1.81	140,771.74	1.79	156,384.16	1.79	174,818.10	1.81
	e. Jasa Perusahaan	96,027.50	1.34	103,681.42	1.32	114,394.82	1.31	124,486.43	1.29
9	JASA-JASA	1,426,298.19	19.97	1,583,849.25	20.12	1,759,132.53	20.14	1,991,824.40	20.65
	a. Pemerintahan Umum	1,074,766.35	15.05	1,195,459.32	15.19	1,314,434.39	15.05	1,483,815.67	15.38
	1. Adm. Pmrth & Pertahanan	1,074,766.35	15.05	1,195,459.32	15.19	1,314,434.39	15.05	1,483,815.67	15.38
	2. Jasa Pemerintah lainnya	0.00		0.00		0.00		0.00	
	b. Swasta	351,531.84	4.92	388,389.94	4.93	444,698.14	5.09	508,008.73	5.27
	1. Sosial Kemasyarakatan	149,949.11	2.10	162,605.18	2.07	185,321.03	2.12	209,214.50	2.17
	2. Hiburan & Rekreasi	16,293.01	0.23	17,521.62	0.22	19,720.54	0.23	22,301.97	0.23
	3. Perorangan & Rumah tangga	185,289.73	2.59	208,263.14	2.65	239,656.58	2.74	276,492.26	2.87
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		7,143,081.12	100	7,871,107.76	100	8,733,568.00	100	9,644,686.08	100

(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2012-2015)

4. PDRB per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan nilai tambah, sedangkan pendapatan perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang diterima masyarakat atas penggunaan faktor produksi yang dimiliki di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Pada tahun 2010 nilai PDRB per kapita Kabupaten Purworejo mencapai Rp 9.299.166,25 dan meningkat menjadi Rp 10.257.226,13 pada tahun 2011 dan meningkat menjadi Rp 11.295.966,83 pada

tahun 2012 dan meningkat menjadi Rp 12.379.558,40 pada tahun 2013. Namun kondisi di tahun 2013 tersebut masih berada di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah yang mencapai Rp 18.751.300,52 maupun skala nasional yang mencapai Rp 36.508.486,32, yang dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2. 6.
PDRB per Kapita Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia
Tahun 2011-2014
(Berdasar PDRB Tahun Dasar 2000)

Cakupan Wilayah	2011	2012	2013	2014
Kab. Purworejo	10.257.226,13	11.295.966,83	12.379.558,40	13.671.039,66
Prov. Jateng	15.376.170,75	17.140.206,42	18.751.300,52	
Indonesia	30.812.926,11	33.338.986,87	36.508.486,32	

(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2012-2015)

5. Indikator Ketimpangan Regional

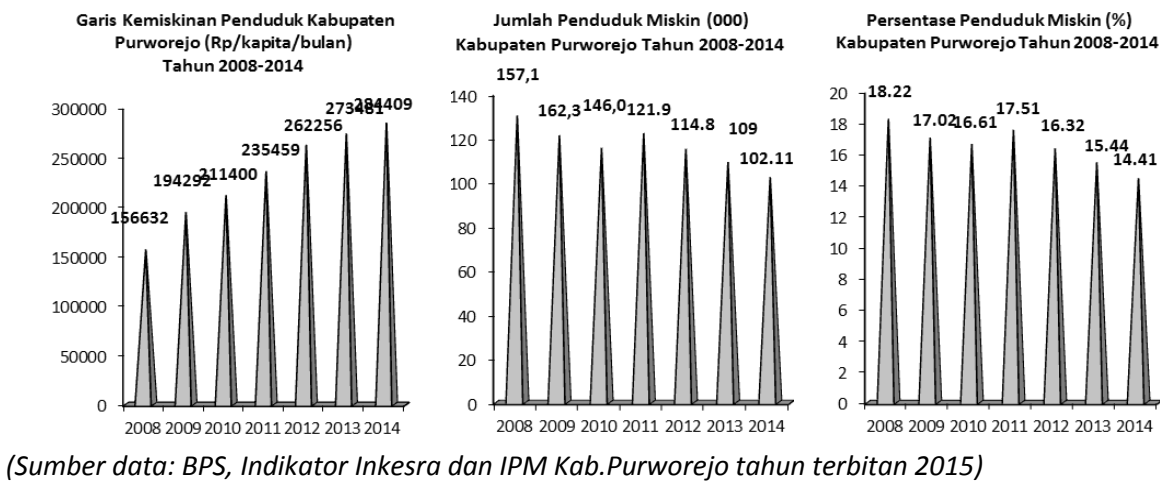
1. Ketimpangan pendapatan

Ketimpangan pendapatan yang akan dimuat disini meliputi kemiskinan, gini ratio serta ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia.

Salah satu metodologi pengukuran kemiskinan yang banyak digunakan adalah menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan pendekatan *basic needs*, maka dapat dihitung “garis kemiskinan konsumsi” dan selanjutnya dapat dihitung persentase penduduk miskin (*Head Count Index*), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan konsumsi. Garis kemiskinan konsumsi dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan bukan makanan per kapita pada kelompok penduduk referensi, yaitu penduduk kelas marginal yang hidupnya berada sedikit di atas garis kemiskinan konsumsi. Garis kemiskinan konsumsi terdiri dari garis kemiskinan makanan (batas kecukupan konsumsi makanan) dan garis kemiskinan non-makanan (batas kecukupan konsumsi non-makanan).

Gambar 2.4
 Data dan Informasi Kemiskinan Kab Purworejo Th 2008 s.d 2014



Ukuran ketimpangan pendapatan berikutnya adalah Gini Rasio. Gini Rasio merupakan koefisien utk menunjukkan derajat ketidakmerataan /ketimpangan secara menyeluruh yang didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Berdasarkan Data Susenas 2013, Gini ratio Kabupaten Purworejo sebesar 0,34 kemudian meningkat menjadi 0,38 pada tahun 2014. Ini menunjukkan ada sedikit peningkatan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Purworejo. Kondisi yang lebih jelas akan tampak pada hasil ukuran ketimpangan kriteria Bank Dunia. Dimana pada tahun 2014 40% penduduk kelompok I yaitu kelompok berpendapatan terendah, persentase pendapatan yang diperolehnya sedikit menurun.

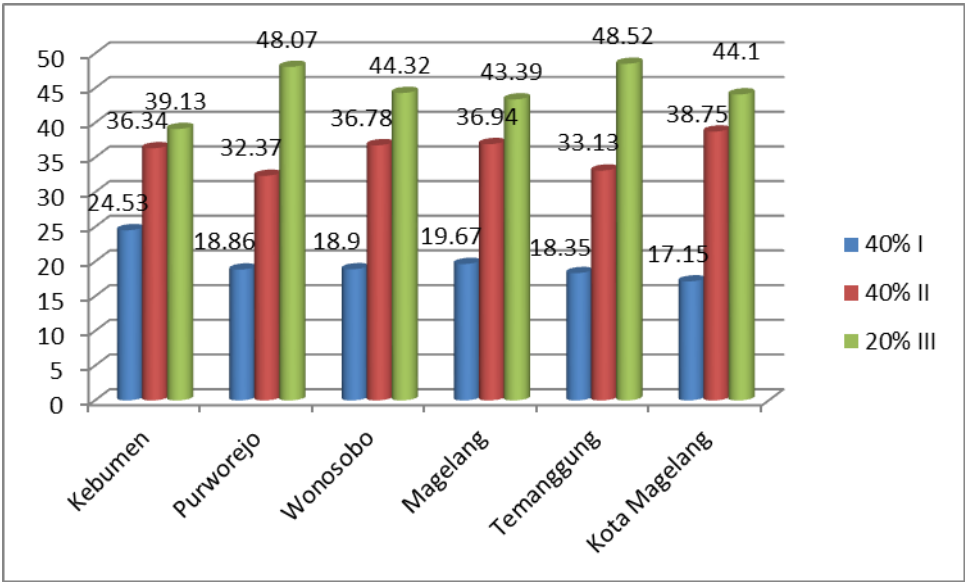
Ukuran Ketimpangan berikutnya adalah ketimpangan pendapatan menurut kriteria Bank Dunia, yang ditentukan dengan memperhatikan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang digolongkan sebagai berikut :

- 1) Memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi
- 2) Memperoleh 12 – 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang

- 3) Memperoleh 17 persen atau lebih, maka ketimpangan pendapatan dianggap rendah.

Berdasarkan hasil perhitungan data susenas 2013 diperoleh, bahwa 40 persen kelompok pertama yaitu kelompok penduduk kurang beruntung memperoleh 21,35 persen dari total pendapatan, sehingga masuk sebagai ketimpangan rendah. Pada tahun 2014 menurun menjadi 18,86 persen, masih termasuk ketimpangan rendah (karena masih diatas 17%). Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di eks Karesidenan Kedu, kondisi tersebut merupakan peringkat keempat setelah Kab.Kebumen, Kab.Magelang dan Kab.Wonosobo, sebagaimana tampak dalam gambar 2.5 berikut ini:

Gambar 2.5
Ketimpangan Pendapatan menurut kriteria Bank Dunia di Kab/Kota se eks
Karesidenan Kedu Jawa Tengah Tahun 2014

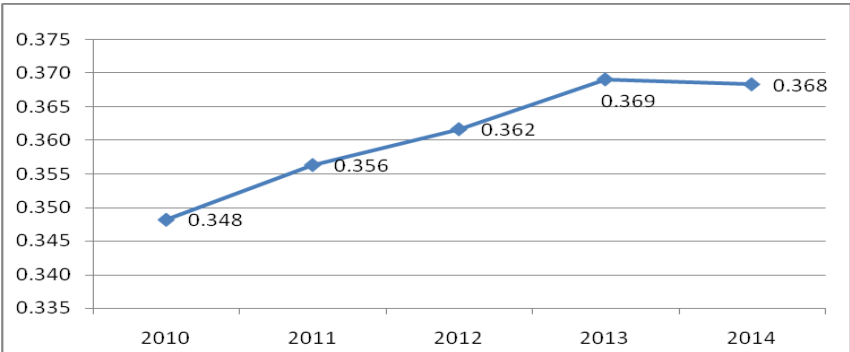


(Sumber data: BPS, Indikator Kesra dan IPM Tahun Terbitan 2015)

2. Ketimpangan antar wilayah

Ketimpangan antar wilayah dapat ditunjukkan dengan besaran Indeks Williamson. Angka indeks ini menunjukkan ketimpangan antar wilayah secara umum dengan pendekatan ekonomi. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik, suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antarwilayah. Upaya-upaya pembangunan melalui intervensi program dan kegiatan terhadap suatu wilayah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus memperkecil kesenjangan antar wilayah. Perkembangan tingkat ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Purworejo selama kurun waktu terakhir ini tampak dalam gambar 2.6 berikut ini.:

Gambar 2.6
Perkembangan Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson) di Kab.Purworejo
Tahun 2010 s.d 2014



(Sumber data: BPS, PDRB Kecamatan tahun terbit 2011 s.d 2015 (diolah)

Pada gambar tersebut tampak bahwa ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Purworejo memiliki kecenderungan meningkat terus sampai dengan tahun 2013, namun kemudian turun sedikit pada tahun 2014 menjadi 0,368.

Apabila dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah kondisi ini relative lebih baik. Indeks Williamson Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 0,69. Semakin kecil angka Indeks Williamson (mendekati nol) menunjukkan tingkat ketimpangan yang makin kecil atau dengan kata lain tingkat pembangunan antar wilayah makin merata.

Gambar 2.7
Tipologi Wilayah Kabupaten Purworejo

Pendapatan per kapita (Y) Pertumbuhan Ekonomi (r)	Y<	Y>
r<	Maju Dengan Pertumbuhan Cepat (Purworejo, Banyuurip, Kutoarjo	Berkembang Cepat (Grabag, Bayan)
r>	Maju Tapi Tertekan (Purwodadi)	Kurang Berkembang (Ngombol, Bagelen, Kaligesing, Butuh, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano, Bener)

Sumber data: BPS, PDRB Kecamatan tahun terbit 2015 (diolah)

Gambar 2.7. tersebut diatas menunjukkan tipologi wilayah-wilayah di Kab.Purworejo yang dikelompokkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya, dengan titik tolak pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita rata-rata di tingkat Kabupaten.
Terdapat 4 kelompok yaitu:

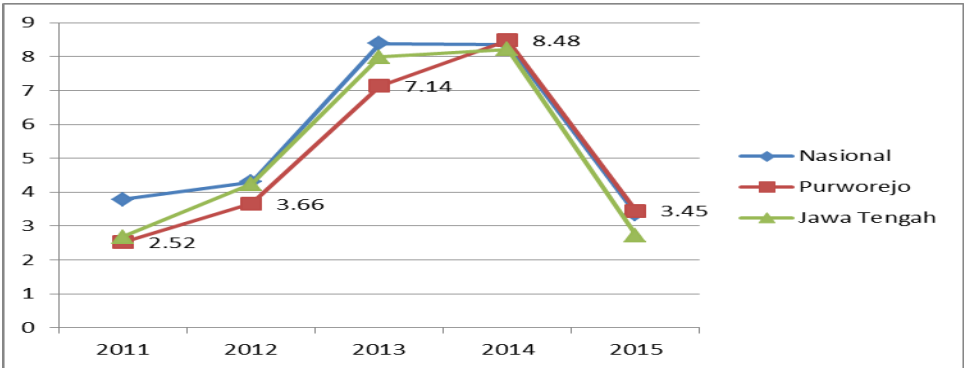
- 1) Maju dengan pertumbuhan cepat, dimana pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonominya tinggi (diatas rata-rata kabupaten). Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Purworejo, Banyuurip dan Kutoarjo)
- 2) Berkembang cepat, dimana pendapatan perkapita rendah (dibawah rata-rata Kabupaten) namun pertumbuhan ekonominya tinggi (diatas rata-rata Kabupaten)
 Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Gebang dan Bayan
- 3) Maju Tapi Tertekan, dimana pendapatan perkapita tinggi (diatas rata-rata Kabupaten) namun pertumbuhan ekonominya rendah (dibawah rata-rata Kabupaten)
 Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Purwodadi
- 4) Kurang Berkembang, dimana pendapatan perkapita maupun pertumbuhan ekonomi kedua-duanya rendah (dibawah rata-rata Kabupaten).
 Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Ngombol, Bagelen, Kaligesing, Butuh, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano, Bener.

6. Inflasi

Kondisi perekonomian daerah tidak bisa lepas dari pengaruh inflasi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, terutama pengaruh kebijakan makro oleh pemerintah secara nasional. Inflasi menunjukkan tingkat perkembangan harga serta kestabilan perekonomian di suatu wilayah. Dengan mencermati tingkat inflasi yang terjadi di suatu wilayah tertentu dari waktu ke waktu akan diketahui tingkat perkembangan harga dan kestabilan perekonomian di wilayah tersebut.

Inflasi Kabupaten Purworejo sepanjang tahun 2015 cukup baik yaitu mencapai 3,45%, jauh lebih rendah dari kondisi tahun 2014 yang sebesar 8,48%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat perubahan harga di Purworejo pada tahun 2015 lebih stabil apabila dibandingkan dengan tahun 2014. Perkembangan inflasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagaimana tampak dalam gambar 2.8.

Gambar 2.8
 Laju Inflasi Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) & Bappeda Purworejo, 2011-2015

Inflasi pada tahun 2015 secara umum dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas dari tujuh kelompok barang dan jasa, yaitu kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok & tembakau, Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar, Sandang, Kesehatan, Pendidikan, Rekreasi & Olahraga, dan kelompok Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan. Distribusi inflasi per kelompok barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7.
Inflasi Kabupaten Purworejo menurut Kelompok Barang dan Jasa Tahun 2011-2015

No.	Kelompok Barang dan Jasa	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bahan Makanan	3,11	3,52	13,80	9,49	3,34
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	2,53	8,09	2,94	8,52	7,30
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar	2,48	2,34	5,17	6,81	6,99
4	Sandang	7,03	1,93	2,25	4,35	0,94
5	Kesehatan	2,03	3,99	1,93	2,92	1,50
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	2,15	1,59	0,64	0,00	2,15
7	Transport, Komunikasi dan Jasa keuangan	0,51	1,13	11,37	16,18	2,94
Inflasi Umum		2,52	3,66	7,14	8,48	3,45

Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Purworejo dari beberapa tahun terbitan.

Secara detil mengenai Inflasi Kabupaten Purworejo menurut bulan dan kelompok barang dan jasa tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8.
Inflasi Kabupaten Purworejo menurut Bulan dan Kelompok Barang dan Jasa Tahun 2015

Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan
Januari	-2,57	-0,16	2,54	0,16	0,00	0,00	-4,23
Februari	-3,19	1,78	2,46	0,20	0,28	0,00	-4,23
Maret	-3,61	2,36	4,41	0,33	0,28	0,00	-4,23
April	-3,58	3,30	4,31	0,05	0,28	0,00	-4,23
Mei	-5,00	4,45	5,96	-0,02	0,28	0,00	-4,23
Juni	-3,59	6,53	5,88	-0,23	1,40	0,00	-4,23
Juli	0,93	6,05	6,04	0,26	1,40	0,47	-1,29
Agustus	1,35	5,89	6,43	0,75	1,50	-2,15	-2,63
September	1,53	5,89	6,43	0,87	1,50	-2,15	-2,63
Oktober	-0,52	6,85	6,43	0,91	1,50	-2,15	-2,63
November	-0,17	6,85	6,99	0,93	1,50	-2,15	-2,94
Desember	3,34	7,30	6,99	0,94	1,50	-2,15	-2,94

Sumber: Indek Harga Konsumen dan Inflasi Kota Purworejo Tahun 2015

Perkembangan laju inflasi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sekitar, Empat Kota Survey Biaya Hidup (SBH), Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9.
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sekitar, Empat Kota Survey Biaya Hidup (SBH), Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2014

No.	Daerah	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kab. Purworejo	2,52	3,66	7,14	8.48	3,45
2.	Empat Kota SBH					
	Purwokerto	3,40	4,73	8,50	7.09	2,52
	Surakarta	1,93	2,87	8,32	8.01	2,56
	Semarang	2,87	4,85	8,19	8.53	2,56
	Tegal	2,58	3,09	5,80	7.40	3,95
3.	Provinsi Jawa Tengah	2,68	4,24	7,99	8.22	2,73
4.	Nasional	3,79	4,30	8,38	8.36	3,35

Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Purworejo dari beberapa tahun terbitan.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Tingkat Pengangguran

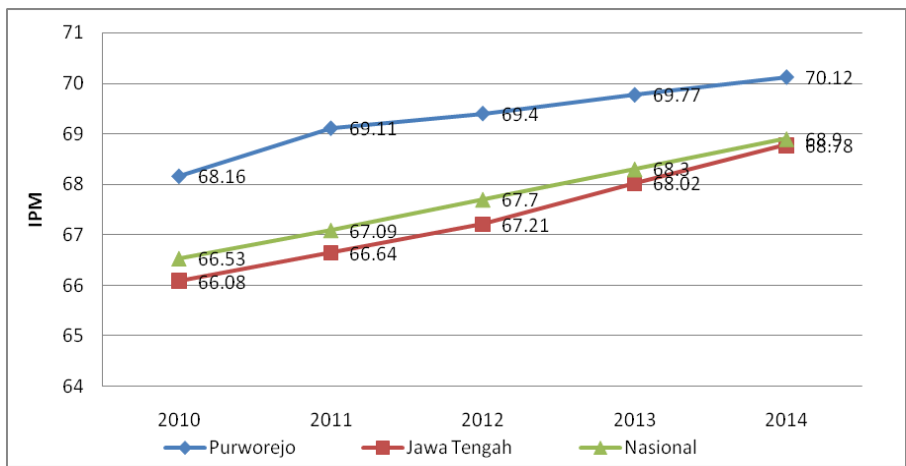
Pada tahun 2014, prosentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja sebesar 64,95%, sementara tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,1%, sementara jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 12.193 orang didominasi pencari kerja berpendidikan setingkat SLTA. (Sumber : Kabupaten Purworejo Dalam Angka, BPS, 2015).

2. Kualitas Pembangunan Manusia

Salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup. Sedangkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah merupakan dimensi pokok yang menunjukkan status tingkat pendidikan. Pengeluaran rill per kapita guna mengukur akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Perkembangan IPM Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tahun 2010-2014 menunjukkan peningkatan. Capaian IPM Kabupaten Purworejo pada tahun 2014 sebesar 70,12 meningkat dari tahun 2013 sebesar 69,77. seperti terlihat pada gambar 2.9.

Gambar 2.9.
Indeks Pembangunan Manusia Purworejo Tahun 2010 – 2014



(Sumber: BPS Kabupaten Purworejo & Bappeda Purworejo, 2010-2014, diolah).

Komponen pembentuk indikator IPM dalam metodologi yang baru ada 4 yaitu: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Lama Sekolah serta Pengeluaran per Kapita.

Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Standar UNDP besarnya adalah $25 < x > 85$ (minimal 25 tahun dan maksimal 85 tahun). Pada tahun 2011 angka harapan hidup di Kabupaten Purworejo adalah 73,56 tahun meningkat menjadi 73,66 tahun di tahun 2012, meningkat menjadi 73,77 di tahun 2013. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 73,83, sedikit di bawah angka Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 73,88

Angka melek huruf pada metodologi yang baru berubah menjadi **Angka Harapan Lama Sekolah** yang menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Standar UNDP minimal 0 dan maksimal 18 tahun.

Pada tahun 2011 angka harapan lama sekolah di Kabupaten Purworejo mencapai 12,69 meningkat menjadi 12,74 di tahun 2012, meningkat menjadi 12,83 pada tahun 2013. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 13,03. Kondisi ini lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah yang hanya mencapai 12,17 di tahun 2014.

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Purworejo adalah 7,39 tahun meningkat menjadi 7,45 tahun di tahun 2011 dan meningkat lagi menjadi 7,51 tahun di tahun 2012, menjadi 7,57 tahun di tahun 2013. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 7,63.

Kondisi ini lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah yang hanya mencapai 6,93 tahun di tahun 2014.

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan merupakan pengeluaran riil perkapita yang telah disesuaikan untuk menggambarkan daya beli masyarakat. Standar UNDP maksimal Rp. 737.720,- yang merupakan proyeksi dari daya beli tertinggi yang dicapai Jakarta pada tahun 2018 dengan asumsi tingkat pertumbuhan daya beli sebesar 6,5% per tahun selama periode 1993-2018. Pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Purworejo meningkat dari Rp. 8.919.000,- di tahun 2010 menjadi Rp. 8.921.000,- di tahun 2011, meningkat menjadi Rp. 9.022.000,- di tahun 2012, menjadi Rp.9.155.000,- di tahun 2013. Pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 9.189.000,-. Namun demikian, pengeluaran per kapita Kabupaten Purworejo masih relatif lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah yang mencapai Rp. 9.640.000,- di tahun 2014.

Berikut ini disajikan perkembangan komponen pembentuk indikator IPM, sebagaimana tabel 2.10. Berdasarkan table tersebut maka indikator pembentuk IPM yang perlu kerja keras adalah Pengeluaran Perkapita.

Tabel 2.10.
Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Purworejo

No.	Tahun	IPM	Indikator Pembentuk			
			Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah (th)	Rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita (rupiah)
1	2010	68,16	73,45	12,26	7.39	8.919
2	2011	69,11	73,56	12,69	7.45	8.921
3	2012	69,40	73,66	12,74	7.51	9.022
4	2013	69,77	73,77	12,83	7,57	9.155
5	2014	70,12	73,83	13,03	7,63	9.189

(Sumber: BPS Kabupaten Purworejo & Bappeda Purworejo, 2009-2014).

IPM Kabupaten Purworejo meningkat setiap tahunnya dan di atas angka propinsi maupun nasional.

3. **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 2.11
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo
Dari Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Kondisi awal	Realisasi			
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketimpangan antara IPM&IPG	71,88 /60,80	72,55/ 64,67	72,91/ 65,49	72,91/ 65,49	74,18/ 66,16
2	IPG	60,80	64,67	65,49	65,49	66,16

Sumber data: Badan KBPM Kab Purworejo Tahun 2015

Ketimpangan IPM/IPG sebesar 71,88/60,80 dan pada tahun 2014 sebesar 74,18/66,16. Hal ini dapat menggambarkan peningkatan indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender dengan selisih ketimpangan yang cenderung semakin menurun. Hal ini terwujud karena terlaksananya program penguatan kelembagaan PUG dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

Sedangkan untuk IPG pada tahun 2010 sebesar 60,80 dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 66,66. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan keberhasilan pembangunan berwawasan gender, yang meliputi usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan sumbangan pendapatan perempuan.

Tabel 2.12
Capaian Komponen Pendukung Ketimpangan IPM dan IPG tahun 2014

No	Komponen Pendukung	Laki-Laki	Perempuan
1	Angka harapan hidup	69,36 tahun	73,32 tahun
2	Rata-rata lama sekolah	8,56 tahun	7,70 tahun
3	Angka melek huruf	96,97%	89,81%
4	Sumbangan pendapatan	68,08%	31,92%

4. Nilai tukar Petani

Nilai Tukar Petani adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan petani. Indikator ini merupakan perbandingan antara harga yang diterima petani atas barang-barang hasil produksi pertaniannya dengan harga yang dibayar petani atas pengeluaran konsumsi untuk kehidupan sehari-hari petani.

Secara umum penghitungan NTP menghasilkan 3 (tiga) pengertian yaitu:

- 1) $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- 2) $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- 3) $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relative lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Nilai Tukar Petani Kabupaten Purworejo pada akhir tahun 2015 menunjukkan kondisi diatas 100 pada subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, maupun perikanan. Perkembangannya setiap bulan tampak pada tabel 2.13 berikut ini:

Tabel 2.13
 Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2015
 Berdasar Bulan dan Sub Sektor Pertanian

Bulan	Tanaman Pangan	Hortikultura	TPR	Perikanan	Umum
Januari	102,07	103,33	102,19	95,52	102,25
Februari	100,31	103,93	100,48	95,20	101,34
Maret	98,32	102,98	100,00	96,47	100,28
April	94,69	99,60	103,62	94,16	99,02
Mei	94,43	102,38	103,62	96,46	99,94
Juni	96,10	97,81	104,53	100,78	99,44
Juli	97,14	102,98	105,05	103,25	101,73
Agustus	99,34	110,92	104,85	103,94	104,99
September	98,42	107,79	105,25	104,59	103,83
Oktober	99,98	100,60	104,87	102,98	101,81
November	100,60	104,65	111,42	104,34	105,41
Desember	102,08	106,86	110,34	112,18	106,59

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam periode tahunan melalui pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Namun demikian dalam pelaksanaannya, program pembangunan mempunyai potensi untuk tidak memberikan hasil sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditargetkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi program pembangunan untuk melihat bagaimana pencapaian tujuan sebuah program/kegiatan dikaitkan dengan proses/tahapan perencanaan sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2015 dilakukan untuk mengetahui Capaian kinerja program dan realisasi output kegiatan. Realisasi Capaian kinerja program pembangunan daerah tahun 2015 dihitung berdasarkan rata-rata capaian output kegiatan pada program tersebut.

Realisasi output dan keuangan pada tahun 2015 pada semua Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

NO	S K P D	ANGGARAN 2015	REALISASI			K E T
			KEUANGAN (Rp)	%	FISIK (%)	
1	2	3	4	5	6	7
11	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	88,062,002,300	69,479,827,869	78.90	89.90	16 kegiatan tidak dilaksanakan
7	DINAS KESEHATAN	54,992,211,836	47,743,397,382	86.82	100.00	
22	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	136,529,379,100	126,454,799,860	92.62	100.00	
9	DINAS PEKERJAAN UMUM	116,308,761,550	116,022,412,959	99.75	99.90	
15	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	29,983,388,900	19,218,407,487	64.10	79.00	5 kegiatan tidak dilaksanakan
12	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	11,248,547,550	10,693,193,245	95.06	99.70	
1	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	10,034,352,920	9,769,697,458	97.36	98.00	
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5,370,937,400	4,716,114,010	87.81	98.55	
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11,847,405,500	5,340,958,362	45.08	92.60	4 kegiatan tidak dilaksanakan
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4,351,620,950	4,065,703,867	93.43	99.70	
5	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	9,107,776,450	7,869,303,231	86.40	92.00	
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4,566,716,050	4,251,680,816	93.10	100.00	
8	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PARIWISATA	14,587,857,980	13,489,523,303	92.47	93.00	
10	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9,389,772,050	8,808,678,566	93.81	99.40	
13	DINAS PERTANIAN PETERNAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	49,546,357,550	13,450,227,791	27.15	33.30	20 kegiatan tidak dilaksanakan
14	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8,540,596,650	7,419,455,967	86.87	93.00	

1	2	3	4	5	6	7
16	INSPEKTORAT	2,480,311,850	2,137,854,627	86.19	84.50	
17	KANTOR ARPUSDA	2,132,973,400	1,860,722,490	87.24	100.00	
18	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1,880,307,000	1,688,542,386	89.80	96.90	
19	KANTOR KETAHANAN PANGAN	2,892,771,900	757,994,060	26.20	27.39	8 kegiatan tidak dilaksanakan
20	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	4,084,063,500	2,690,216,789	65.87	68.00	7 kegiatan tidak dilaksanakan
21	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	771,051,900	749,463,835	97.20	100.00	
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3,046,196,700	2,561,168,066	84.08	84.00	
24	SEKRETARIAT DAERAH	14,167,860,500	11,498,315,808	81.16	95.70	1 kegiatan tidak dilaksanakan
25	SEKRETARIAT DPRD	12,764,451,160	10,396,917,695	81.45	95.00	4 kegiatan realiasi keuangan 20%
26	KECAMATAN BAGELEN	584,650,100	577,734,438	98.82	100.00	
27	KECAMATAN BANYUURIP	509,633,942	472,549,214	92.72	98.00	
28	KECAMATAN BAYAN	754,476,904	454,398,170	60.23	90.00	3 kegiatan tidak dilaksanakan
29	KECAMATAN BENER	517,952,000	503,065,800	97.13	100.00	
30	KECAMATAN BRUNO	519,406,700	505,202,931	97.27	100.00	
31	KECAMATAN BUTUH	934,932,500	805,413,294	86.15	100.00	
32	KECAMATAN GEBANG	450,526,000	413,937,222	91.88	95.00	
33	KECAMATAN GRABAG	521,870,200	499,667,392	95.75	95.90	
34	KECAMATAN KALIGESING	419,400,200	400,095,144	95.40	100.00	
35	KECAMATAN KEMIRI	427,016,650	406,811,073	95.27	100.00	
36	KECAMATAN KUTOARJO	520,299,000	474,650,241	91.23	94.00	
37	KECAMATAN LOANO	436,689,600	426,775,880	97.73	100.00	
38	KECAMATAN NGOMBOL	570,927,000	560,804,436	98.23	100.00	
39	KECAMATAN PITURUH	501,892,400	400,258,070	79.75	98.00	1 kegiatan tidak dilaksanakan
40	KECAMATAN PURWODADI	463,046,000	437,034,704	94.38	99.00	
41	KECAMATAN PURWOREJO	620,611,550	547,512,756	88.22	98.00	
42	KELURAHAN BALEDONO	437,266,900	436,576,757	99.84	100.00	
43	KELURAHAN BANDUNG	335,486,600	330,588,556	98.54	100.00	
44	KELURAHAN BAYEM	358,596,500	349,817,488	97.55	100.00	
45	KELURAHAN BOROKULON	525,518,900	520,214,100	98.99	100.00	
46	KELURAHAN CANGKREP KIDUL	472,947,650	470,745,389	99.53	100.00	
47	KELURAHAN CANGKREP LOR	345,139,000	339,298,790	98.31	100.00	
48	KELURAHAN DOPLANG	349,714,000	346,226,327	99.00	100.00	
49	KELURAHAN KATERBAN	355,484,000	348,587,655	98.06	100.00	
50	KELURAHAN KEDUNGSARI	367,566,900	361,522,942	98.36	100.00	
51	KELURAHAN KESENENG	351,025,000	336,501,875	95.86	100.00	
52	KELURAHAN KLEDUNG KARANG DALEM	410,356,000	400,339,474	97.56	100.00	
53	KELURAHAN KLEDUNG KRADENAN	511,981,900	505,020,895	98.64	100.00	
54	KELURAHAN KUTOARJO	402,617,500	396,288,868	98.43	100.00	
55	KELURAHAN LUGOSOBO	598,778,000	594,162,888	99.23	100.00	
56	KELURAHAN MRANTI	323,743,500	319,479,357	98.68	100.00	
57	KELURAHAN MUDAL	478,832,500	473,493,830	98.89	100.00	
58	KELURAHAN PADUROS	520,629,800	515,615,983	99.04	100.00	
59	KELURAHAN PANGEN JURU TENGAH	389,495,700	384,265,985	98.66	100.00	
60	KELURAHAN PANGENREJO	391,961,000	388,057,471	99.00	99.00	
61	KELURAHAN PURWOREJO	474,751,400	470,096,899	99.02	100.00	

1	2	3	4	5	6	7
62	KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN	335,866,050	323,356,539	96.28	100.00	
63	KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN	472,953,500	466,465,356	98.63	100.00	
64	KELURAHAN SINDURJAN	349,858,000	349,560,814	99.92	100.00	
65	KELURAHAN SUCENJURUTENGAH	376,382,700	375,270,390	99.70	100.00	
66	KELURAHAN TAMBAKREJO	393,808,400	386,713,944	98.20	100.00	
	J U M L A H	190,647,473,556	131,596,718,464	69.03	95.30	

Capaian kinerja beberapa bidang, meliputi : pemerintahan, penurunan angka kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis, dan pembangunan infrastruktur, dengan didukung pembangunan bidang lainnya. Secara garis besar capaiannya sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pemerintahan

Untuk tahun 2015, pelaksanaan Bidang Pemerintahan telah melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya Perencanaan Pembangunan dan Tata Pemerintahan.

1. Bidang Perencanaan Pembangunan

Untuk tahun 2015, Bidang Perencanaan Pembangunan melaksanakan 10 (sepuluh) program melalui 45 (empat puluh lima) kegiatan. Secara rinci tingkat capaian pada masing-masing program pada Bidang Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut:

No	Program	Jumlah Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Perencanaan Tata Ruang	4	100%
2.	Pengembangan Data/Informasi perencanaan	3	100%
3.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	100%
4.	Perencanaan Pembangunan Daerah	13	98,46%
5.	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4	100%
6.	Perencanaan Sosial Budaya	6	100%
7.	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	2	100%
8.	Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	2	100%
9.	Penelitian dan Pengembangan	4	100%
10.	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	5	100%
	Jumlah	45	

Terdapat 1 (satu) program yang belum dapat mencapai target 100%, yaitu Program perencanaan pembangunan daerah, kegiatan pilot project desa intervensi program penanggulangan kemiskinan realisasi fisik 80%.

2. Bidang Tata Pemerintahan

Untuk tahun 2015, terdapat 19 (sembilan belas) program pada 151 (seratus lima puluh satu) kegiatan pada Bidang Tata Pemerintahan. Secara rinci capaian kinerja Bidang tata Pemerintahan adalah sebagai berikut:

No	Program	Jumlah Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2	30%
2.	Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	2	39,17%
3.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	7	95%
4.	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	2	100%
5.	Penyusunan Kebijakan Kepala Daerah	8	100%
6.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	2	100%
7.	Peningkatan Koordinasi SKPD	17	97,88%
8.	Pengembangan Kebijakan Pemerintah	10	96,01%
9.	Penataan Kelembagaan Daerah	2	100%
10.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Pelayanan Sarana Peribadatan	3	98,22%
11.	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	100%
12.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	11	100%
13.	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	2	100%
14.	Kerjasama Informasi dan Media Massa	3	100%
15.	Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa	10	91%
16.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	28	93,10%
17.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	6	100%
18.	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1	100%
19.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	34	100%
	Jumlah	151	

- Program yang capaian kinerjanya tidak mencapai 100%, meliputi :
- 1) Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, karena Kegiatan Identifikasi tanah negara dan permohonan hak pengelolaan lahan realisasi output 0%, dan Kegiatan Fasilitasi Sekretariat pengadaan tanah untuk kepentingan umum realisasi output 60%
 - 2) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, karena Kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan realisasi output 45%; dan Kegiatan Fasilitasi dan mediasi tukar menukar /ganti rugi tanah kas desa realisasi output 33%
 - 3) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, karena Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga realisasi output 68%; Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya realisasi output 95,24%; Kegiatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional realisasi output 94,75%
 - 4) Program Peningkatan Koordinasi SKPD, karena Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM realisasi output 70%; Kegiatan Koordinasi Bidang Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan realisasi output 95%; Kegiatan Koordinasi Bidang Agama,Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi realisasi output 97,50%
 - 5) Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah, karena Kegiatan Penyelesaian Perkara PN dan PTUN 60%
 - 6) Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Pelayanan Sarana Peribadatan, karena Kegiatan Pendampingan Badan Amal zakat (BAZ)

Kab.Purworejo realisasi output 98%; Kegiatan Pembinaan Badko TPQ realisasi output 96,67%

- 7) Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitas Pemerintahan Desa, karena Kegiatan Fasilitas Pengisian Perangkat Desa realisasi output 10%.
- 8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, karena kegiatan Penanganan Penyelenggaraan Penerimaan calon Praja IPDN realisasi output 0%, kegiatan Penanganan kegiatan ijin belajar, pemakaian gelar dan tugas belajar realisasi output 75%, kegiatan penanganan LHKPN realisasi output 50%,kegiatan penataan dalam jabatan realisasi output 70%, Kegiatan Pembangunan Zona Integritas realisasi output 75%.

2.2.2. Penurunan Angka Kemiskinan

Upaya penurunan angka kemiskinan pada tahun 2015 telah ditempuh dengan melaksanakan berbagai kegiatan pada Bidang Industri Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

1. Bidang Industri Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah

Pelaksanaan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan tahun 2015 untuk penurunan angka kemiskinan melalui bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah diimplementasikan dalam 8 (delapan) program melalui 35 (tiga puluh lima) kegiatan. Secara rinci capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No	Program	Jumlah Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	1	100%
2.	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	6	100%
3.	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	5	100%
4.	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	7	100%
5.	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	10	100%
6.	Pengembangan industri kecil dan menengah	1	100%
7.	Peningkatan kemampuan teknologi industri	3	78,33%
8.	Penumbuhan industri berbasis sumber daya lokal	2	60%
	Jumlah	35	

Kegiatan yang bersifat hibah kepada masyarakat pada program peningkatan kemampuan teknologi industry dan program penumbuhan industry berbasis sumber daya local tidak dapat mencapai realisasi fisik 100% karena terkendala regulasi/aturan pemberian hibah yang harus berbadan hukum.

2. Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Pelaksanaan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan tahun 2015 dalam rangka penurunan angka kemiskinan melalui bidang Sosial,

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi diimplementasikan dalam 8 (delapan) program melalui 56 (lima puluh enam) kegiatan. Secara rinci program prioritas dan tingkat capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No	Program	Jumlah Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	2	100%
2.	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	12	92,17%
3.	Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	2	100%
4.	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	5	100%
5.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	11	93,18%
6.	Peningkatan Kesempatan Kerja	8	87,50%
7.	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	13	100%
8.	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	3	43,33%
	Jumlah	56	

Dari 8 (delapan) program pada Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terdapat 4 (empat) program yang tidak mencapai target secara optimal (100%), yaitu:

- a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja hanya mencapai 93,18% karena terdapat Kegiatan pelatihan non institusional kejuruan realisasi fisik 85%, permasalahan karena untuk bantuan peralatan tidak bisa di berikan karena sesuai dengan UU No. 23 Th. 2014 Ps. 298, kelompok penerima belum memiliki badan hukum;
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, terdapat 7 kegiatan yang tidak mencapai 100%, yaitu kegiatan Penanganan penyandang cacat, Kegiatan Pembinaan Keluarga Perintis/Pahlawan, Kegiatan penanganan orang terlantar, dan anak terlantar luar panti, kegiatan pengadopsian anak, kegiatan fasilitasi pelaksanaan PKH, kegiatan pelatihan ketrampilan kerja bagi anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, dan eks napi, kegiatan dukungan dana stimulant pemulihan social untuk rehabilitasi rumah korban bencana banjir dan tanah longsor.
- c. Program Peningkatan kesempatan kerja, terdapat 1 kegiatan bantuan hibah peralatan daur ulang realisasi fisik 0%, permasalahan karena pemohon belum berbadan hukum Indonesia yang terdaftar di Kemenkumham.
- d. Program pengembangan wilayah transmigrasi hanya mencapai 43,33% karena Kegiatan Peningkatan kerjasama antarwilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi realisasi fisik 30%, permasalahan karena Penjajakan 1 lokasi (Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur) tidak dilaksanakan berdasarkan surat Disnakertransduk no.475.1 tanggal 10 November 2015 tentang perubahan alokasi target penempatan transmigrasi 2015 Peninjauan 2 lokasi (Sumba Timur , NTT dan Banyuasin, Sumsel) tidak dilaksanakan; kegiatan fasilitasi penempatan transmigrasi, realisasi fisik 0%, permasalahan karena Berdasarkan Surat No: 595/DTKT/816/XII/ 2015 tentang Hasil Penilaian Siap Terima Penempatan bahwa lokasi catrans belum siap.

2.2.3. Bidang Kesehatan

Untuk tahun 2015, Bidang Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan dan RSUD Saras Husada telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam menunjang prioritas pembangunan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2015 dengan 15 (lima belas) program prioritas melalui 54 (lima puluh empat) kegiatan dengan capaian kinerja 100%

Secara rinci program prioritas dan tingkat capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No	Program	Jumlah Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4	100%
2.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	8	100%
3.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	2	100%
4.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	3	100%
5.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	4	100%
6.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	5	100%
7.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	3	100%
8.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	100%
9..	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	2	100%
10.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	2	100%
11	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	14	100%
12.	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	1	100%
13	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1	100%
14	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	1	100%
15	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2	100%
	Jumlah	54	

2.2.4. Bidang Pendidikan

Untuk tahun 2015 Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan 6 (enam) program dengan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kegiatan. Secara rinci capaian kinerja kegiatan pada Bidang Pendidikan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Program	Jumlah Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	15	89,38%
2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	53	96,04%
3.	Program Pendidikan Menengah	42	80,36%
4.	Program Pendidikan Non Formal	9	100%
5.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20	98,50%
6.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	19	90,26%
	Jumlah	179	

Terdapat lima (5) program yang tidak dapat optimal dalam mencapai target yang direncanakan, yaitu:

- a. Program Pendidikan Anak usia dini capaian kinerja 89,38%,yang direncanakan karena Kegiatan Bantuan operasional PAUD desa miskin capaian realisasi fisik 0%, sedangkan kegiatan bantuan rintisan PAUD baru (DID) capaian realisasi fisik 30%

- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun hanya mencapai 96,04%, karena terdapat tiga (3) kegiatan yang tidak mencapai 100%, yaitu Pengadaan sarana kelas jauh (DID) 80%; Kegiatan pengadaan peralatan pendidikan dan seni budaya dan ketrampilan SD (DAK) realisasi fisik 5 %, dan kegiatan pengadaan peralatan pendidikan jasmani, OR dan kesehatan SD (DAK) realisasi fisik 5%.
- c. Program Pendidikan Menengah hanya mencapai 80,36% karena terdapat empat (4) kegiatan yang realisasi fisik 0%, yaitu kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan Dan Perabotnya SMA (DAK) 0%; kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Termasuk Perabotnya SMK (DAK) 0%, kegiatan Pembangunan Perpustakaan SMA (DAK Luncuran 2014) 0%; dan kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Perabotnya SMA (DAK) 0%. Kegiatan Pengadaan Peralatan Praktik SMK Non Teknik Industri (DAK Luncuran 2014) realisasi fisik 5%, dan kegiatan yang realisasinya 70%, yaitu kegiatan Pembangunan Ruang Praktek Siswa dan Perabotnya SMK (DAK), kegiatan Pengadaan Peralatan Praktek Non Teknologi/Rekayasa SMK (DAK), kegiatan Pengadaan Peralatan Praktek Teknologi/Rekayasa SMK (DAK), kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK (DAK Luncuran 2014), kegiatan Pengadaan Peralatan Praktik SMK Teknik Industri (DAK Luncuran 2014), kegiatan Pembangunan Jamban Siswa SMA termasuk sanitasi (DAK), kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA (DAK); kegiatan Rehabilitasi Sedang Ruang Pembelajaran SMK (DAK); kegiatan Pembangunan Jamban Siswa SMK termasuk Sanitasi (DAK); kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK (DAK); dan kegiatan Pengadaan Sarana Olahraga dan atau Kesenian SMK (DAK)
- d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mencapai 98,50%. Satu (1) kegiatan pengelolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik (banprov) realisasi fisik 70%.
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan hanya mencapai 90,26%, kegiatan Beasiswa siswa keluarga kurang mampu realisasi fisik 5%, dan kegiatan Beasiswa Retrival realisasi fisik 10%

2.2.5. Bidang Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis

Dalam pelaksanaan prioritas pembangunan bidang ketahanan pangan dan pengembangan agrobisnis di tahun 2015 dapat diuraikan berbagai progran bidang dalam arti luas berikut capaian kinerjanya, sebagai berikut:

1. Bidang Ketahanan Pangan

Pelaksanaan kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan dijalankan oleh Kantor Ketahanan Pangan selama tahun 2015 melalui Program Ketahanan Pangan dengan 23 (dua puluh tiga) kegiatan, dengan capaian kinerja 39,72%.

No.	Program	Jumlah Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	23	39,72%
	Jumlah	23	

Kegiatan yang bersifat hibah barang tidak mencapai 100%, hal ini disebabkan terkendala regulasi tentang hibah barang yang diwajibkan berbadan hukum sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kegiatan Primatani berbasis pekarangan (banprov) realisasi fisik 0%.

2. Bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan

Capaian kinerja kegiatan untuk Bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan selama tahun 2015 melalui 16 (enam belas) Program Ketahanan Pangan dengan 108 (sertus delapan) kegiatan, sebagai berikut:

No.	Program	Jumlah Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan Kesejahteraan Petani	11	85,09%
2.	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	4	53%
3.	Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	15	74%
4.	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	9	56,17%
5.	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	17	91,47%
6.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	6	85%
7.	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	11	54,55%
8.	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	2	63%
9.	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	1	100%
10.	Pembinaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1	71%
11.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	2	100%
12.	Pengembangan Budidaya Perikanan	9	91,33%
13.	Pengembangan Perikanan Tangkap	9	100%
14.	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	3	100%
15.	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	6	35,5%
16.	Deseminasi Teknologi Perikanan	2	52%
	Jumlah	108	

Realisasi fisik untuk kegiatan hibah kepada masyarakat di bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan tidak dapat mencapai 100%, permasalahan karena regulasi tentang persyaratan hibah sesuai dengan UU No. 23 Th. 2014 Ps. 298.

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Capaian kinerja kegiatan untuk Bidang Kehutanan dan Perkebunan yang dilaksanakan selama tahun 2015 melalui 5 (lima) Program Ketahanan Pangan dengan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan, sebagai berikut:

No.	Program	Jumlah Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	5	100%
2.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	10	100%
3.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	13	72%
4.	Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan	2	100%
5.	Perencanaan dan pengembangan hutan	3	100%
	Jumlah	33	

Dari 5 (lima) program yang dijabarkan dalam 33 (tiga puluh tiga) kegiatan. Terdapat satu (1) program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan, meliputi 4 kegiatan, yaitu kegiatan pembuatan sumur resapan, kegiatan pengendalian erosi di perbukitan di hulu DAS, kegiatan pembuatan embung, dan kegiatan pembangunan teras tidak mencapai 100%.

2.2.6. Bidang Infrastruktur

Prioritas program infrastruktur meliputi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan sasaran meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung peningkatan ekonomi (jalan, jembatan, irigasi, listrik, sarana air bersih) melalui pola pendanaan yang efisien dan efektif.

1. Bidang Pengairan

Pelaksanaan prioritas program infrastruktur Bidang Pengairan didukung dengan 3 (tiga) program utama yang dijabarkan melalui 41 (empat puluh satu) kegiatan dan telah dilaksanakan dengan capaian 100%.

No.	Program	Jumlah Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	24	100%
2.	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	9	100%
3.	Program pengendalian banjir	8	100%
	Jumlah	41	

2. Bidang Pekerjaan Umum

Ada sebanyak 11 (sebelas) program yang direncanakan pada tahun 2015 sebagai upaya untuk penyediaan infrastruktur yang memadai melalui 121 (seratus dua puluh satu) kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum. Capaian kinerja 100%, secara rinci atas program dan kegiatan sebagai berikut:

No.	Program	Jumlah Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Pengembangan Perumahan	8	100%
2.	Lingkungan Sehat Perumahan	2	100%
3.	Pengelolaan Areal Pemakaman	1	100%
4.	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong	5	100%
5.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	68	100%
6.	Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan	3	100%
7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	2	100%
8.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah	6	100%
9.	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	1	100%
10.	Pengelolaan Kebersihan, Pertamanan, Penerangan Jalan	14	100%
11.	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	11	100%
12.	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1	100%
	Jumlah	122	100%

Tabel. 2.13 : Hasil Evaluasi RPJMD s/d Tahun kelima (2015)

Misi	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja			SKPD Pengelola	Tingkat Capaian 2015
			Kondisi Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir (Tahun 2015)	Realisasi 2015		
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan politik melalui pemberdayaan masyarakat serta penjangkaran aspirasi masyarakat dengan memanfaatkan mekanisme politik yang sehat dan dinamis							
	1. Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	1. Tingkat swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pertumbuhannya meningkat (dari nilai hibah/bantuan)	8%	15%	8.83%	KBPM	58.87%
		2. Jumlah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desa yang berperan aktif dalam pembangunan desa	469	469	469	KBPM	100.00%
	2. Meningkatnya inovasi dan kreativitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	1. Temuan inovasi dan kreativitas masyarakat pertumbuhannya meningkat	0%	50%	53.3%	KBPM	106.60%
	3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan di desa	1. Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbangdes	10%	30%	30%	KBPM	100.00%
		2. Desa/Kelurahan yang sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Desa (RPJMD-Des)	250	469	469	KBPM	100.00%
		3. Prosentase ketertiban administrasi pemerintahan desa (hasil lomba desa)	80%	100%	100%	KBPM	100.00%
		1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyapaikan pendapat di pemilu	1. Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu (PILPRES, PILLEG, PILKADA)	53%	60%	61.87%	Kesbangpol
2. Meningkatnya keamanan dan		1. Prosentase penanganan pelanggaran peraturan perda & perbup	100%	100%	100%	Satpol PP	100.00%

Misi	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja			SKPD Pengelola	Tingkat Capaian 2015
			Kondisi Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir (Tahun 2015)	Realisasi 2015		
	ketertiban di masyarakat	2. Prosentase penanganan konflik yang terjadi di masyarakat	100%	100%	100%	Satpol PP	100.00%
	3. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana	1. Prosentase pelayanan penanggulangan bencana alam	100%	100%	100%	BPBD	100.00%
Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas							
Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis yang Berdaya Saing	1. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dalam arti luas	1. Produktivitas lahan budidaya pertanian padi, palawija, dan hortikultura meningkat (ha/tahun)	70,000	72,500	117,977	Diperlatanak dan Kantor KP	162.73%
		2. Produktivitas tenaga kerja bidang pertanian meningkat (orang/tahun)	700,000	725,000	897,220	Diperlatanak dan Kantor KP	123.75%
	2. Penguatan kelembagaan pertanian dalam arti luas (kelompok tani)	1. Prosentase kelompok tani berbadan hukum (kelompok tani)	0	15	19	Diperlatanak dan Kantor KP	126.67%
	3. Penguatan permodalan usaha pertanian dalam arti luas	1. Jumlah kelompok usaha pertanian dalam arti luas yang diberi permodalan (kelompok)	3	20	295		1475.00 %
	4. Pembatasan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian	1. Luas alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (ha)	16	11	5,44	Diperlatanak dan Kantor KP	200.00%
	5. Meningkatkan jenjang kelas kelompok tani	1. Jumlah jenjang kelompok tani					
		Pemula	1,013	50%	30%	Diperlatanak dan Kantor KP	60.00%

Misi	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja			SKPD Pengelola	Tingkat Capaian 2015
			Kondisi Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir (Tahun 2015)	Realisasi 2015		
		Lanjut	838	50%	34%	Diperlatanak dan Kantor KP	68.00%
		Madya	93	50%	130%	Diperlatanak dan Kantor KP	260.00%
		Utama	0	5	19	Diperlatanak dan Kantor KP	380.00%
	6. Meningkatkan cakupan pelayanan irigasi pedesaan	1. Panjang jaringan irigasi pedesaan dalam kondisi baik (m)	202,952	252,952	222,652	Diperlatanak dan Kantor KP	88.02%
	7. Meningkatnya produksi komoditas pertanian	1. Jumlah produksi padi (ton)	302,895	357,888	358,548	Diperlatanak dan Kantor KP	100.18%
		2. Jumlah produksi jagung (ton)	26,122	37,073	18,370	Diperlatanak dan Kantor KP	49.55%
		3. Jumlah produksi kedelai (ton)	3,279	5,470	3,948	Diperlatanak dan Kantor KP	72.18%
	8. Meningkatnya produksi hasil ternak, populasi ternak, kelahiran IB, dan penanganan teknak sakit	1. Jumlah produksi daging (kg)	7,253,574	8,008,528	9,027,330	Diperlatanak	112.72%
		2. Jumlah produksi telur (ton)	924,115	1,071,300	1,426,940	Diperlatanak	133.20%
		3. Jumlah populasi ternak besar (ekor)	17,736	22,170	21,286	Diperlatanak	96.01%
		4. Jumlah populasi ternak kecil (ekor)	213,686	267,108	257,464	Diperlatanak	96.39%
		5. Jumlah populasi ternak unggas (ekor)	1,114,956	1,393,695	3,431,077	Diperlatanak	246.19%
		6. Jumlah populasi aneka ternak (ekor)	3,063	3,829	7,134	Diperlatanak	186.33%
		7. Jumlah kelahiran IB (ekor)	2,467	3,750	5,124	Diperlatanak	136.64%

Misi	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja			SKPD Pengelola	Tingkat Capaian 2015
			Kondisi Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir (Tahun 2015)	Realisasi 2015		
		8. Jumlah hewan sakit yang tertangani (ekor)	100%	100%	100%	Diperlatanak	100.00%
		9. Jumlah penanganan pencegahan penyakit hewan (ekor)	100%	100%	100%	Diperlatanak	100.00%
	9. Meningkatnya pertumbuhan hutan rakyat dan konservasi sumber daya hutan	1. Luas hutan rakyat (ha)	39,509	41,009	41,435	Dinhutbun	101.04%
		2. Luas lahan kritis (ha)	36,830	33,989	24,489.25	Dinhutbun	138.79%
		3. Luas lahan pengembangan hasil hutan bukan kayu (ha)	50	175	200	Dinhutbun	114.29%
	10. Meningkatnya produksi tangkap nelayan Kabupaten Purworejo di 5 TPI	1. Jumlah produksi tangkap laut (ton)	42	62	58	Diperlatanak	93.55%
	11. Meningkatnya produksi perikanan budidaya	1. Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	657	1,370	3,921	Diperlatanak	286.20%
		2. Jumlah produksi benih ikan (ekor)	20,394,400	34,898,400	33,108,000	Diperlatanak	94.87%
	12. Meningkatnya kualitas dan produksi pengolahan ikan	1. Jumlah pengolah ikan yang dibina (orang)	50	400	575	Diperlatanak	143.75%
	1. Meningkatnya ketersediaan pangan	1. Prosentase cadangan pangan daerah	32.00%	50.00%	293.30%	Kantor KP	586.60%
		2. Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan (ton/1000 penduduk)	93	93	93	Kantor KP	100.00%
		3. Jumlah produksi padi/beras (ton)	302,895	357,888	358,548	Kantor KP	100.18%
		4. Jumlah desa rawan pangan (desa)	50	40	40	Kantor KP	100.00%
	2. Meningkatnya distribusi dan keterjangkauan bahan pangan	1. Prosentase kestabilan harga beras	84%	100%	97.8%	Kantor KP	97.80%
		2. Prosentase kemudahan akses distribusi pangan sampai ke tingkat keluarga	85%	100%	100%	Kantor KP	100.00%
	3. Meningkatnya konsumsi dan keamanan pangan	1. Prosentase jumlah gizi yang dikonsumsi/kapita/hari (gizi=kalori, protein, vitamin, lemak, dan mineral yang dikonsumsi penduduk)	86.20%	100%	90,7%	Kantor KP	90.00%

Misi	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja			SKPD Pengelola	Tingkat Capaian 2015
			Kondisi Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir (Tahun 2015)	Realisasi 2015		
	1. Meningkatnya penggunaan pola agribisnis dan agroindustri dalam pengelolaan potensi pertanian	1. Prosentase pertumbuhan jumlah industri pengolahan hasil pertanian	13,554	15%	15%	Diskoperindag par	100.67%
Mewujudkan iklim yang kondusif serta ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi dalam mewujudkan industri jasa dan perdagangan guna mendorong kemajuan daerah berbasis agribisnis							
Pembangunan Infrastruktur yang Pro Investasi dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas penataan ruang	1. Jumlah perencanaan tentang Tata Ruang yang di-Perda-kan	0	5	3	Bappeda	60.00%
		2. Tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	50%	70%	65%	Bappeda dan DPU	92.86%
	2. Meningkatnya penggunaan pola pendanaan yang efisien, efektif sehingga memperkecil eksternalitas (tingkat pencemaran lingkungan)	1. Pencegahan pencemaran air	20%	100%	100%	Kantor LH	100%
		2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber yang tidak bergerak	0%	100%	100%	Kantor LH	100%
		3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa	0%	100%	100%	Kantor LH	100%
		4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	50%	100%	100%	Kantor LH	100%
		5. Berkurangnya luas areal pertambangan yang dapat merusak lingkungan	5.355 ha	(3467,75 ha) 35%	(89.307.65 6 Ha) 32.49%	SDAESDM dan Kantor LH	108%
	1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi (jalan jembatan, irigasi listrik, sarana air bersih dan lain-lain)	1. Prosentase jalan dengan kualitas baik	55.00%	60%	76.55%	DPU	128%
		2. Prosentase jembatan dengan kondisi baik	67%	74.10%	92.12%	DPU	124%
		3. Rasio layanan irigasi (Daerah Irigasi tercukupi)	44.40%	67.40%	72.03%	SDAESDM	107%
		4. Akses air bersih (dari 181 desa rawan air bersih tertangani)	64.00%	88%	116.02%	DPU	132%

Misi	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja			SKPD Pengelola	Tingkat Capaian 2015
			Kondisi Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir (Tahun 2015)	Realisasi 2015		
Meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah yang semakin luas dan berkualitas		5. Akses sanitasi (rumah tangga bersanitasi) (%)	50.00%	80%	77.638%	DPU	97%
		6. Prosentase cakupan layanan air limbah	40%	60%	91.38%	DPU	152%
		7. Prosentase cakupan layanan persampahan	40%	60%	100%	DPU dan Kantor LH	167%
		8. Luas genangan air hujan/banjir yang tertangani	20%	30%	17.26%	Dinas Pengairan dan DPU	58%
		9. Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air (3 Daerah Aliran Sungai)	25%	35%	32.93%	SDAESDM	94%
		10. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	85%	90%	80.43%	DPU, KBPM, Kesbangpol, & BPBD	89%
		11. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	82.00%	86%	52.64%	DPU	61%
		12. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	52.3%	57%	57.69%	DPU	101%
		13. Prosentase ketersediaan sarpras perhubungan sesuai kebutuhan	25%	80%	97.11%	Dishubkominpar	121%
		14. Prosentase sarana perhubungan dengan kondisi baik	40%	70%	98.48%	Dishubkominpar	141%
		15. Prosentase jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ sesuai kebutuhan	30%	75%	75%	Dishubkominpar	100%
		16. Dusun tanpa akses listrik	9.60%	5.00%	5.00%	SDA	100%
		17. Jumlah pemanfaatan energi alternatif baru terbarukan (unit)	0	60	27	Diskoperindagpar	45%

Misi	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja			SKPD Pengelola	Tingkat Capaian 2015
			Kondisi Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir (Tahun 2015)	Realisasi 2015		
Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik (<i>Good Governance</i>)	1. Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan serta aset-aset pemerintah daerah	1. Prosentase pertumbuhan pendapatan (PAD, Bagi Hasil, Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan)	Rp 60,9 M	30% 79,17 M	424.24% (319.26 M)	DPPKAD	1400%
	2. Optimalisasi kualitas dan peran BUMD, koperasi dan UMKM	1. Prosentase bagian laba BUMD	Rp 2,1 M	25% (2,79 M)	173.71% (5.74 M)	DPPKAD dan Bagian Perekonomian SETDA	692.%
	2. Optimalisasi kualitas dan peran BUMD, koperasi dan UMKM	2. Prosentase jumlah koperasi sehat	27%	75%	81.33%	Diskoperindag par	108.4%
		3. Prosentase peningkatan jumlah UMKM	7%	10%	42%	Diskoperindag par	420.00%
	1. Berkembangnya potensi daerah melalui pendekatan klaster dan kawasan	1. Prosentase peningkatan jumlah kluster yang terbentuk	26 kluster/ usaha bersama	30%	135%	Diskoperindag par	450.00%
	2. Meningkatnya jaringan pemasaran produk-produk lokal	1. Persentase peningkatan transaksi produk lokal	13.61%	23.00%	19.00%	Diskoperindag par	82.61%
		2. Prosentase pertumbuhan ekspor	0.00%	60.00%	47.00%	Diskoperindag par	78.33%
	3. Meningkatnya nilai tambah produk lokal	1. Prosentase rata-rata pertumbuhan PDRB	9.78%	9.85%	9.79%	Diskoperindag par	99.39%
	4. Meningkatnya nilai investasi pembangunan daerah	1. Prosentase peningkatan jumlah investor	323	25% (431)	41% (572)	KPMPT	164.00%
		2. Prosentase peningkatan nilai investasi	43 M	25%(55,8 M)	125%(111,3 M)		500.00%
		3. Jumlah perijinan investasi yang diterbitkan	324	25%	572 / (500%)	KPMPT	
	5. Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata	1. % pertumb. PDRB atas dasar harga konstan untuk sektor hotel & restoran.	12%	16%	17%	Diskoperindag par	106.25%
		1. Kontribusi pariwisata terhadap PAD	1.42%	6.19%	17.00%	Diskoperindag par	274.64%

Misi	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja			SKPD Pengelola	Tingkat Capaian 2015
			Kondisi Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir (Tahun 2015)	Realisasi 2015		
	6. Meningkatnya perlindungan dan pemanfaatan aset budaya	1. Jumlah bangunan bersejarah yang dilindungi dengan perda	50%	100%	100%	Dikbudpora	100.00%
		2. Jumlah event/ pagelaran seni budaya tradisional yang diadakan	9	50	84	Dikbudpora	168.00%
		3. Jumlah kelompok seni dan budaya yang terpelihara	453	519	579	Dikbudpora	111.56%
	7. Meningkatnya manajemen pengelolaan NJOP	1. Prosentase Tanah yang memiliki bukti kepemilikan tanah resmi berupa sertifikat	25.45%	35%	30.75%	Bagian Pemerintahan Setda dan DPPKAD	87.86%
		2. Prosentase rata-rata pertumbuhan konstibusi pajak dari pertanahan (bumi dan bangunan) terhadap PAD	19.32%	24%	28.49%	Bagian Pemerintahan Setda dan DPPKAD	118.71%
Mewujudkan profesionalisme aparatur dan pemerintahan yang amanah, bersih, bebas dari KKN dan demokratis, dengan mengutamakan penegakan hukum, jaminan keselamatan dan ketertiban umum didukung oleh partisipasi masyarakat yang tinggi							
	1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur	1. Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional, dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik (Prosentase kompetensi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya)	80%	90%	94.33%	BKD dan Setda	105%
		2. Prosentase Aparatur Pemerintah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan SDM	72%	85%	91.27%	BKD	107%
		3. Prosentase tingkat pendidikan aparat	56%	90%	96.22%	BKD	107%
		4. Prosentase tingkat pelanggaran disiplin PNS	28%	13.75%	2.19%	BKD	628%
		5. Prosentase aparat yang mendapatkan penghargaan	78%	85%	78.35%	BKD	92%

Misi	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja			SKPD Pengelola	Tingkat Capaian 2015
			Kondisi Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir (Tahun 2015)	Realisasi 2015		
		6. Prosentase penempatan aparat sesuai dengan kompetensinya	50%	90%	92.10%	BKD	102%
		7. Prosentase Aparatur yang bebas dari Praktek KKN	75%	100%	100%	Setda	100%
		8. Prosentase Tingkat disiplin dan etos kerja Aparatur	90%	100%	100%	Setda	100%
		9. Prosentase Tingkat tertib administrasi kepegawaian	70%	95%	95.01%	BKD	100%
	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	1. Prosentase SKPD yang menyusun LAKIP	100%	100%	100%	Setda	100%
		2. Prosentase SKPD yang predikat akuntabilitas baik	-	20%	100%	Inspektorat	500%
	3. Meningkatkan mekanisme dan tata hubungan antar SKPD / instansi sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan & pembangunan	1. Prosentase kesesuaian bentuk lembaga perangkat daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	98%	100%	100%	Setda	100%
		2. Prosentase efektifitas mekanisme dan tata hubungan kerja lembaga perangkat daerah/instansi	90%	100%	100%	Setda	100%
	4. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan public	1. Prosentase SKPD yang menerapkan SPM	8%	20%	19%	Setda	95%
		2. Prosentase SKPD yang memiliki SOP	8%	20%	19%	Setda	95%
		3. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang sudah memiliki IKM (Indeks Kepuasan Masy)	3	12 SKPD /Unit Kerja	16	Setda	100%
		3. Berkurangnya tindak komplain masyarakat terhadap pelayanan publik (melalui SPK dan SMS)	60	47	16	Setda	34%

Misi	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja			SKPD Pengelola	Tingkat Capaian 2015
			Kondisi Awal Tahun Perencanaan 10	Target Akhir (Tahun 2015) 20	Realisasi 2015 17		
	5. Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan anatar eksekutif dan legislatif sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.	1. Jumlah Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan kerjasama aktif Pemerintah Daerah dan DPRD				Setwan	85%
		2. Waktu Penetapan APBD	Tepat wkt (dead line 31 Desember T.A sebelumnya)	Tepat waktu (dead line 31 Desember T.A sebelumnya)	Tepat Waktu (ditetapkan tanggal 21 Desember 2016)	DPPKAD	
	6. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	1. Prosentase tertib administrasi keuangan daerah dengan opini hasil audit BPK	Wajar dengan pengecualian	Wajar tanpa pengecualian	Wajar tanpa pengecualian	DPPKAD	
	7. Optimalisasi fungsi kecamatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	1. Prosentase tertib administrasi kecamatan dan desa (terkoordinasinya kecamatan dan desa; terlayannya masyarakat untuk administrasi pemerintahan kecamatan); (ketersediaan prioritas pembangunan wilayah; terfasilitasinya penyusunan APBDesa; terkendalikannya pelaksanaan APBDesa; terfasilitasinya pemenuhan/penanganan target pembayaran PBB, IMB, SP3; terfasilitasi dan terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan wilayah); dan (terjaganya kondusifitas ketertiban dan keamanan wilayah; terfasilitasi dan terbinanya kegiatan pemberdayaan masyarakat)	100%	100%	100%	Kecamatan	100%

Misi	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja			SKPD Pengelola	Tingkat Capaian 2015
			Kondisi Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir (Tahun 2015)	Realisasi 2015		
	8. Optimalisasi fungsi kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	1. Prosentase tertib administrasi kelurahan (terlayannya masyarakat untuk administrasi pemerintahan kelurahan); (ketersediaan prioritas pembangunan kelurahan; terfasilitasi dan terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan kelurahan); dan (terjaganya kondusifitas ketertiban dan keamanan kelurahan; terfasilitasi dan terbinanya kegiatan pemberdayaan masyarakat)	100%	100%	100%	Kelurahan	100%
	9. Terselenggaranya pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Tingkat ketersediaan produk-produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	100%	100%	100%	Bagian Hukum Setda	100%
	10. Optimalisasi fungsi konstruktif pengawasan	1. Prosentase jumlah kasus yang tertangani	39 kasus	100%	100%	Inspektorat	100%
		2. Prosentase pengembalian kerugian negara/daerah ke Kas negara/daerah	813,838,962	100%	100%	Inspektorat	100%
	11. Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan meliputi perencanaan pembangunan pada tingkat makro maupun mikro serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah	1. Rasio rencana pembangunan yang terealisasi	75.00%	100%	95.27%	Bappeda	95%
		2. Rasio rencana dengan kompetensi standar	2.50%	100%	100%	Bappeda	100%
		3. Prosentase efisiensi kinerja SKPD	74.40%	100%	83.03%	Bappeda	83%
		4. Prosentase efektivitas kinerja SKPD	78.70%	100%	95.02%	Bappeda	95%

Misi	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja			SKPD Pengelola	Tingkat Capaian 2015
			Kondisi Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir (Tahun 2015)	Realisasi 2015		
	12. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	1. Lamanya waktu yang diperlukan untuk pelayanan kependudukan (hari)					
		a. KK	3	2	2	Disdukcapi	100%
		b. KTP	3	1	1	Disdukcapi	100%
		c. Pindah Datang	1	1	1	Disdukcapi	100%
		d. Akte Kelahiran	21	14	7	Disdukcapi	200%
		e. Akte Kematian	14	12	7	Disdukcapi	171%
		f. Keterangan Lahir Mati	14	12	*	Disdukcapi	kewenang an kades/kal ur
		g. Akte Perkawinan	14	12	4	Disdukcapi	300%
		h. Akte Perceraian	14	12	3	Disdukcapi	400%
		i. Pengakuan anak	14	12	7	Disdukcapi	171%
		j. Pengesahan Anak	14	12	7	Disdukcapi	171%
		k. Perubahan Nama	24	18	7	Disdukcapi	257%
		l. Perubahan Status Kewarganegaraan	24	18	7	Disdukcapi	257%
		m. Pembatalan Perkawinan	14	12	7	Disdukcapi	171%
		n. Pembatalan Perceraian	14	12	7	Disdukcapi	171%
		2. Prosentase Penduduk yang memiliki KTP	100%	100%	88.15%	Disdukcapi	88%
		3. Prosentase Kepemilikan akta kelahiran	100%	100%	95.5%	Disdukcapi	96%
		4. Prosentase terpeliharanya data base kependudukan	100%	100%	100%	Disdukcapi	100%

Misi	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja			SKPD Pengelola	Tingkat Capaian 2015
			Kondisi Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir (Tahun 2015)	Realisasi 2015		
	13. Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintah dan pembangunan daerah	1. Prosentase pem-publish-an data dan informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat dan terbaru	60%	100%	100%	Dishubkominfo dan Bagian Humas Setda	100%
		2. Jumlah Sistem Informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah berbasis TI	10	20	77	Dishubkominfo dan Bagian Humas Setda	385%
		3. Prosentase SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN	50%	100%	100%	Dishubkominfo dan Bagian Humas Setda	100%
		4. Prosentase pengendalian tower telekomunikasi	50%	100%	100%	Dishubkominfo dan Bagian Humas Setda	100%
	14. Peningkatan ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan	1. Prosentase ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan	50%	100%	116.67%	Bappeda	117%
	15. Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal	1. Jumlah berkas (dokumen/arsip negara) yang dikelola dengan baik	26,299	35,000	52,215	Kantor Arpusda	149%
	16. Meningkatnya pelayanan keperpustakaan daerah	1. Jumlah masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan daerah	33,871	34,500	29,317	Kantor Arpusda	85%
		2. Jumlah sekolah/tempat yang di singgahi perpustakaan keliling	45	50	50	Kantor Arpusda	100%
		3. Jumlah koleksi bahan pustaka	34,992	37,500	37,670	Kantor Arpusda	100%
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan (pencegahan dan peningkatan kualitas)	1. Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	109.17	102	73.36	DKK	72%
		2. Kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	12.67	8	12.16	DKK	152%
		3. Prevalensi gizi buruk	0.16%	0.10%	0.097	DKK	9700%

Misi	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja			SKPD Pengelola	Tingkat Capaian 2015
			Kondisi Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir (Tahun 2015)	Realisasi 2015		
		4. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota	100%	100%	100.0%	DKK	100%
		5. Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	94%	96%	88.7%	DKK	92%
		6. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	88%	100%	100%	DKK	100%
		7. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%	96%	98.6%	DKK	103%
		8. Cakupan pelayanan nifas	96%	96%	97.3%	DKK	101%
		9. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	45%	100%	69.8%	DKK	70%
		10. Cakupan kunjungan bayi	92%	95%	98.3%	DKK	103%
		11. Cakupan pelayanan anak balita	37%	90%	76.5%	DKK	85%
		12. Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	5%	100%	100.0%	DKK	100%
		13. Cakupan peserta KB Aktif	80%	85%	84.6%	DKK	100%
		14. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit					
		a. Acute Falcid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk berusia < 15 tahun	100%	100%	100.0%	DKK	100%
		b. Pneumonia Balita	100%	100%	100.0%	DKK	100%
		c. Pasien baru TB BTA positif	100%	100%	100.0%	DKK	100%
		d. Penderita DBD yang ditangani	100%	100%	100.0%	DKK	100%
		e. Penderita diare	100%	100%	100.0%	DKK	100%
		15. Usia harapan hidup (tahun)	70.01	72.00	72.00	DKK	100%
		16. Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya (MDG's)	100%	100%	100%	DKK	100%

Misi	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja			SKPD Pengelola	Tingkat Capaian 2015
			Kondisi Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir (Tahun 2015)	Realisasi 2015		
		17. Cakupan pelayanan gawat darurat level 3 yg hrs diberikan sarana kes (RS) di kabupaten	60%	75.00%	80.25%	RSU Saras Husada	107%
		18. Cakupan pelayanan pasien rawat jalan yang tertangani	75%	85%	98.71%	RSU Saras Husada	116%
		19. Cakupan pelayanan pasien rawat inap yang tertangani	75%	85%	98.91%	RSU Saras Husada	116%
		20. Pencapaian RSUD Saras Husada terakreditasi menjadi RSUD Tipe B-Pendidikan	60%	75%	100%	RSU Saras Husada	133%
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan (pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan)	1. Cakupan desa siaga aktif	50%	80%	100%	DKK	125%
		2. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	100%	100%	DKK	100%
		3. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	100%	DKK	100%
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan (bagi penduduk miskin)	1. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin (Peserta Askeskin)	238.603 peserta	80%	100%	DKK	125%
		2. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	DKK	100%
		3. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI usia 6-24 bulan bagi keluarga miskin	100%	100%	100%	DKK	100%
	4. Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1. Berkurangnya Jumlah keluarga sejahtera I (KS I) dan keluarga pra sejahtera (pra KS)	45%	41%	43.94%	BKBPP	107%
		2. Berkurangnya Jumlah keluarga pra sejahtera (pra KS)	27.26%	15%	5.37%	BKBPP	36%
		3. Prosentase partisipasi aktif masyarakat dalam ber-KB	70%	80%	82.40%	BKBPP	103%
	5. Meningkatnya pemerataan dan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK)					
		a. APK PAUD formal	48.65%	61%	71.19%	Dikbudpora	117%

Misi	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja			SKPD Pengelola	Tingkat Capaian 2015
			Kondisi Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir (Tahun 2015)	Realisasi 2015		
	perluasan akses memperoleh kesempatan pendidikan (Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Kesetaraan Pendidikan)	b. APK SD/MI/Paket A	103.90%	102%	101.74%	Dikbudpora	100%
		c. APK SMP/MTs/Paket B	94.20%	100%	98.14%	Dikbudpora	98%
		d. APK SMA/SMK/MA/Paket C	61.68%	65%	84.95%	Dikbudpora	131%
		2. Angka Partisipasi Murni (APM)					
		a. APM PAUD formal	48.65%	61%	41.54%	Dikbudpora	68%
		b. APM SD/MI/Paket A	88.79%	95%	85.93%	Dikbudpora	90%
		c. APM SMP/MTs/Paket B	71.52	76.80%	77.94%	Dikbudpora	101%
		d. APM SMA/SMK/MA/Paket C	45.23	50%	63.50%	Dikbudpora	127%
	6. Meningkatnya mutu relevansi dan daya saing pendidikan (Kualitas mutu & relevansi serta Kesetaraan Pendidikan)	1. Rasio layanan tenaga pendidik berkualifikasi S1/D4					
		a. Jenjang PAUD	5.26%	85%	50.93%	Dikbudpora	60%
		b. Jenjang SD/SDLB	21.48%	88%	83.47%	Dikbudpora	95%
		c. Jenjang SMP/SMPLB	76.15%	98%	90.39%	Dikbudpora	92%
		d. Jenjang SMA/SMK/SMALB	85.73%	98%	93.82%	Dikbudpora	96%
		2. Rasio layanan tenaga pendidik telah bersertifikasi					
		a. Jenjang PAUD	4.20%	85%	54.37%	Dikbudpora	64%
		b. Jenjang SD/SDLB	21.48%	80%	56.08%	Dikbudpora	70%
		c. Jenjang SMP/SMPLB	76.15%	90%	61.22%	Dikbudpora	68%
		d. Jenjang SMA/SMK/SMALB	5.73%	90%	82.50%	Dikbudpora	92%
		3. Angka melek huruf	89.20%	90.60%	100.00%	Dikbudpora	110%
		4. Rata-rata lama sekolah (tahun)	7	9	9	Dikbudpora	100%
		5. Ketersediaan kurikulum nasional dan lokal	100%	100%	100%	Dikbudpora	100%
		6. Keterlaksanaan kurikulum nasional dan lokal	100%	100%	100%	Dikbudpora	100%
		7. Angka putus sekolah maksimal					
		a. Jenjang SD/SDLB	0.05%	0.01%	0.03%	Dikbudpora	300%

Misi	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja			SKPD Pengelola	Tingkat Capaian 2015
			Kondisi Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir (Tahun 2015)	Realisasi 2015		
		b. Jenjang SMP/SMPLB	0.09%	0.05%	0.06%	Dikbudpora	120%
		8. Prosentase kelulusan					
		a. Jenjang SD/SDLB	99.23%	100%	100%	Dikbudpora	100%
		b. Jenjang SMP/SMPLB	95.21%	100%	100%	Dikbudpora	100%
		c. Jenjang SMA/SMK/SMALB	97.29%	100%	100%	Dikbudpora	100%
		9. Lulusan yang melanjutkan					
		a. Jenjang SD/SDLB	98.21%	100%	102%	Dikbudpora	102%
		b. Jenjang SMP/SMPLB	90.59%	93.50%	103.37%	Dikbudpora	111%
		10. Rasio guru dengan siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA					
		a. Jenjang SD/SDLB	1:22	1:28	1:13	Dikbudpora	83%
		b. Jenjang SMP/SMPLB	1:18	1:28	1:14	Dikbudpora	84%
		c. Jenjang SMA/SMK/SMALB	1:15	1:32	1:11	Dikbudpora	77%
		11. Peningkatan sarana prasarana pendidikan					
		a. Ruang Kelas SD/SDLB baik	69.73%	90%	72.23%	Dikbudpora	80%
		b. Ruang Kelas SMP/SMPLB baik	73.60%	95%	83.83%	Dikbudpora	88%
		c. Ruang Kelas SMA/SMK/SMALB baik	95.10%	98%	87.01%	Dikbudpora	89%
		d. Ketersediaan Ruang Perpust SD	23.12%	30%	75.22%	Dikbudpora	251%
		e. Ketersediaan Lab. IPA Lengk SMP	73.68%	100%	97.17%	Dikbudpora	97%
	7. Meningkatnya tata kelola dan pencitraan publik pendidikan (Kepastian/Kerterjaminan Pendidikan)	1. Satuan pendidikan telah terakreditasi					
		a. Jenjang SD/SDLB	100%	100%	98.41%	Dikbudpora	98%
		b. Jenjang SMP/SMPLB	100%	100%	97.17%	Dikbudpora	97%
		c. Jenjang SMA/SMK/SMALB	100%	100%	80.28%	Dikbudpora	80%
		2. Satuan pendidikan dengan nilai akreditasi minimal B					
		a. Jenjang SD/SDLB	91.91%	100%	96.94%	Dikbudpora	97%

Misi	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja			SKPD Pengelola	Tingkat Capaian 2015
			Kondisi Awal Tahun Perencanaan	Target Akhir (Tahun 2015)	Realisasi 2015		
		b. Jenjang SMP/SMPLB	74,75%	100%	90.29%	Dikbudpora	90%
		c. Jenjang SMA/SMK/SMALB	1,67%	100%	87.72%	Dikbudpora	88%
		3. SMK yang telah memiliki standar ISO 9001:2008	11.11%	50%	54.76%	Dikbudpora	110%
		4. Jumlah regulasi tentang biaya pendidikan	1	10	9	Dikbudpora	90%
	8. Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga.	1. Jumlah prestasi olahraga	12	25	27	Dikbudpora	108%
		2. Jumlah kelompok kepemudaan berprestasi	11	12	11	Dikbudpora	92%
	9. Meningkatnya kualitas penduduk usia produktif	1. Prosentase penduduk usia produktif yang memiliki kompetensi	64.80%	85.00%	80.60%	Dikbudpora	95%
	1. Menurunnya angka kemiskinan	1. Turunnya jumlah pengangguran (orang)	14,937	12,251	3,188	Dinsosnakertrans	26%
	1. Menurunnya angka kemiskinan	2. Jumlah keluarga miskin yang bertansmigrasi	40%	45%	0%	Dinsosnakertrans	2015 dibatalkan
	1. Menurunnya angka kemiskinan	3. Turunnya angka kemiskinan	17.20%	11.83%	14.04%	Dinsosnakertrans	84%
	2. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan social	1. Prosentase proporsi PMKS terhadap jumlah penduduk	5.00%	7%	9.83%	Dinsosnakertrans	140%
	3. Meningkatnya kesetaraan gender (GDI)	1. Ketimpangan antara IPM dan IPG	71,88/60,80	73/65	74.18/66.16	KBPM	101%
		2. IPG	60.8	65	66.16	KBPM	102%
	4. Meningkatnya perlindungan keamanan terhadap perempuan dan anak	1. Prosentase tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	100%	100%	100%	KBPM	100%

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada bidang urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

- Ketersediaan tenaga pendidik telah bersertifikasi jenjang PAUD masih sedikit karena diantaranya masih banyak tenaga pendidik PAUD yang hanya lulusan SMP dan SMA. Hal ini dikarenakan banyaknya pendirian PAUD di desa-desa yang mengambil tenaga pendidik lulusan SMP dan SMA.
- Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
- Belum optimalnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan (Manajemen Pengelolaan Sekolah).
- Keterkaitan sistem dan substansi pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal belum mampu memenuhi ekspektasi/kebutuhan pasar tenaga kerja;
- Masih terdapat tenaga pendidik yang tidak memenuhi kesesuaian bidang keahliannya.
- Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global masih kurang;
- Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan wawasan keilmuan belum tercipta.
- Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun belum berjalan mantap dan sesuai harapan;
- Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan masih perlu ditingkatkan mutunya
- Fasilitas/sarana penunjang pendidikan di setiap jenjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum cukup memadai dan merata;
- Penyebaran Sumber Daya Manusia baik tenaga edukatif maupun tenaga administratif masih belum merata;

- Masih terdapat angka putus sekolah yang belum tertampung dalam pendidikan formal dan non formal.
- Rendahnya mutu dan daya saing lulusan yang terlihat dari nilai rata-rata Ujian Nasional dan lulusan SMA/SMK/MA yang diterima di Perguruan Tinggi maupun yang diterima di dunia industry
- Sarpras kurang memadai (kualitas dan kuantitas), tenaga pendidik kurang memadai (kualitas dan kuantitas), manajemen pengelolaan proses belajar, kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD
- Cakupan layanan pendidikan non formal belum merata

2. Kesehatan

- Realisasi anggaran Jamkesda tidak mencapai target karena metoda yang digunakan adalah sistem klaim.
- Pasien JKN/BPJS untuk dapat dilayani di poli rawat jalan harus melalui dua tahapan pendaftaran (Loket BPJS dan Loket pendaftaran RSUD);
- Waktu tunggu pasien rawat jalan lama baik di pelayanan poliklinik maupun pelayanan penunjang (Farmasi,
- Ruang tunggu yang tersedia tidak sesuai tidak sesuai lagi dengan jumlah pasien yang berkunjung di rawat jalan sehingga pasien tidak nyaman;
- Adanya beberapa jenis peralatan kesehatan yang harus dilengkapi untuk pelayanan Rawat Jalan.
- BOR tidak sehat karena standar ideal BOR yang sehat 6080% sehingga tidak dapat dilakukan sterilisasi ruang dan adanya antrian pelayanan di IGD.
- Berapa pasien yang akan dirawat inap tidak dapat langsung masuk ke ruang rawat inap (harus menunggu di ruang IGD sampai beberapa hari);
- Menyulitkan rumah sakit dalam membersihkan dan mensterilisasi ruangan rawat inap yang akan digunakan;
- Menyulitkan rumah sakit untuk melakukan pemeliharaan ruang rawat inap;

- Adanya beberapa sarana yang belum tersedia sesuai yang di amanahkan oleh Permenkes Nomor 56 tahun 2014;
- Adanya beberapa jenis peralatan kesehatan yang harus dilengkapi untuk pelayanan Rawat Inap, IBS, ICU,PICU/NICU sesuai Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- Pembangunan Gedung Rawat Inap 2 lantai belum dapat dilaksanakan pada tahun 2013 dan hanya baru dilaksanakan Pengadaan Dokumen Perencanaan karena Pagu Anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
- Rencana fungsi pembangunan rawat inap 2 lantai yaitu Lantai 1 untuk pelayanan rawat inap dan Lantai 2 untuk pelayanan penunjang yaitu Ruang arsip Rekam Medik dan Kegiatan Rumah Sakit Pendidikan
- Adanya beberapa jenis ruangan yang diperlukan ruang IGD (perlu setting ulang ruangan di IGD untuk bedah minor, laboratorium, Depo farmasi) sesuai Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
- Adanya beberapa jenis peralatan kesehatan yang harus dilengkapi untuk pelayanan IGD.
- Kompetensi SDM/Petugas IGD ada yang masa sertifikasi telah habis masa berlakunya.
- Belum tersedianya dokter spesialis yang on set di IGD 24 jam.
- Kelengkapan peralatan penunjang medik yang belum memenuhi kebutuhan dalam pelayanan kesehatan.
- Adanya beberapa jenis peralatan kesehatan yang harus dilengkapi untuk pelayanan (Radiologi, Laboratorium, CSSD, Rehabilitasi Medik sesuai Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
- Sarana prasarana yang belum memadai, kurangnya SDM kesehatan baik kualitas maupun kuantitas, rendahnya manajemen kesehatan,akses yang belum terjangkau masyarakat pedesaan lemahnya pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Tantangan universal access 100% (akses air minum) – 0% (permukiman kumuh)–100% (akses sanitasi).
- Status pelayanan **air minum** masih **77,76%** rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, dengan cakupan di perkotaan dan perdesaan.
- Status pelayanan **sanitasi** kabupaten purworejo masih **77,35 %** rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan
- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik masih 72,83 %
- Prosentase jembatan dalam kondisi baik 96,54 %
- Prosentase saluran irigasi dalam kondisi berfungsi masih 29,98%
- Prosentase bendung dalam kondisi berfungsi masih 34,57%
- Jumlah panjang saluran serta infrastruktur drainase lain yang telah direncanakan untuk dibangun dalam rencana induk sistem drainase yang tercantum dalam perencanaan kota/kabupaten masih 247.955 m
- Jumlah panjang saluran yang telah dibangun dan mampu dikelola “O/P” nya masih 54.132 m
- Prosentase saluran drainase dalam kondisi baik masih 21,83%
- Isu penanganan air bersih Non PDAM berkuatnya pada permasalahan ketersediaan air baku, masalah sarana dan prasarana, lemahnya manajemen pengelolaan.
- Masalah penanganan erosi (misal yang terjadi di bruno dan kaligesing)
- perlu perhatian pada irigasi di kawasan perbatasan
- perlu perhatian irigasi di kawasan bonorowo (setiap menjelang panen dibendung untuk mencegah air asin masuk, namun saat musim penghujan harus dibongkar kembali agar tidak banjir
- perlu perhatian utk sarana prasarana air bersih di daerah perbatasan terutama yang rawan air bersih. saat ini ada daerah rawan air bersih yang untuk droping air bersihnya mengambil dari sumber mata air yang ada di Kulonprogo

- Perda RTRW revisinya agar berhati-hati agar tidak kembali menjadi permasalahan yang menghambat investasi dan harus dilandasi dengan KLHS yg baik serta memasukkan kawasan pergudangan terpadu yang dapat dikembangkan sebagai gudang logistic.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Prosentase Ketersediaan rumah (KK) masih 76,79%
- Teridentifikasi 11 lokasi kawasan **kumuh** dengan luas sekitar **197,41 ha**
- Pendataan perumahan, perlu mekanisme serah terima infrastruktur yang dibangun developer kepada Pemda.
- Tentang Backlog rumah untuk penanganan RTLH agar datanya lebih rigid lagi.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Apatis masyarakat yang timbul karena tidak terakomodirnya kepentingan pemilih, kinerja partai politik, lembaga legislative, pejabat publik dan jalannya pemerintahan.
- Pendidikan politik kepada masyarakat / pemilih yang belum menyeluruh.
- Keterbatasan jumlah aparat BPBD yang hanya berjumlah 33 orang belum optimal ketika menghadapi kejadian bencana di banyak tempat secara bersamaan
- Belum terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki
- Dokumen dan kajian terkait bencana masih banyak yang perlu disusun.
- Pedagang Kaki Lima (PKL) walaupun sering ditertibkan namun mereka masih selalu melanggar ketentuan atau aturan zona berdagang khususnya kawasan Alun-alun Purworejo.
- Permasalahan Pengemis gelandangan Orang Terlantar (PGOT), PSK, remaja jalanan masih sering terlihat walaupun sudah dilaksanakan rasia.

- Permasalahan pertimbangan menggunakan alat berat yang masih melakukan kegiatannya walaupun sudah diperingatkan dan pada tahun 2015 aturan mengenai penambangan menjadi kewenangan Provinsi.
- Keterbatasan personil Satpol PP yang belum memenuhi aturan Permendagri No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Anggota Pol PP Pasal 10 yakni rasio perhitungan 201 s/d 300 anggota.
- Masih kurangnya jumlah PPNS.
- Satpol PP saat ini masih kurang memenuhi standar sarana prasarana, kantor dan gudang penyimpanan sarana prasarana pendukung kegiatan.

6. Sosial.

- Belum optimalnya penanganan masalah penyandang sosial khususnya di masyarakat di pedesaan
- Masih tingginya persentase penduduk miskin,
- rendahnya pendapatan penduduk miskin

2.3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah di bidang urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Tenaga kerja;

- Berkurangnya antusiasme pencari kerja untuk mengakses informasi melalui bursa kerja on line
- Masih kurangnya perhatian yang memadahi dari semua pihak tentang K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja)
- Masih adanya perusahaan yang tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya di BPJS Ketenagakerjaan
- Masih adanya tenaga kerja yang diberikan di bawah upah UMK,
- Rendahnya tingkat ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- Masih adanya ketidakadilan gender, Masih adanya kekerasan pada perempuan dan anak ,Budaya patriaki yang masih melekat di masyarakat

3. Pangan;

- Masih banyak desa rawan pangan (45 desa)
- Belum optimalnya fungsi lumbung pangan sebagai cadangan pangan di desa
- Masih banyaknya lahan bero.
- Tingginya laju alih fungsi lahan.
- Kurangnya penganeekaragaman konsumsi pangan
- Adanya isu nasional tentang kedaulatan pangan,
- Terbatasnya data dukung ketersediaan pangan terutama di tingkat keluarga, pedagang petani hal ini disebabkan kurangnya keterbukaan pedagang untuk melaporkan stok bahan pokok /ketersediaan bahan pokok di gudang,
- Terbatasnya personil khususnya tenaga analisis pangan sehingga menghambat tercapainya kinerja ketahanan pangan;
- Masyarakat desa miskin sulit di berdayakan untuk maju karena adanya kendala terutama factor pendidikan rendah, budaya di lingkungannya yang kurang mendukung/ sulit berubah;
- Masih banyaknya lumbung pangan masyarakat yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah sehingga berpengaruh terhadap cadangan pangan masyarakat , dan lumbung yang tidak di fungsikan akan menjadi rusak;
- Diperlukan pembangunan lumbung pangan minimal 1 desa 1 lumbung untuk memperkuat cadangan pangan di masyarakat.
- Komsumsi pangan di masyarakat belum beragam, bergizi , seimbang dan aman seperti yang dianjurkan oleh departemen kesehatan.
- Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
- Sangat sempitnya kepemilikan lahan ditingkat petani, sehingga sulit untuk diusahakan secara ekonomis.
- Ketersediaan air kurang karena banyaknya saluran irigasi yang rusak.
- Degradasi lahan sebagai akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan
- Ketersediaan pupuk kurang
- Anomali iklim (banjir/kekeringan)

4. Pertanahan;

- Masih adanya konflik-konflik pertanahan
- Masih lemahnya database tanah

5. Lingkungan hidup;

- Masih rendahnya Rumah Tangga yg menerapkan 3R (13,78%)
- Volume sampah yg tertangani 3R masih 87.840 m3
- Perlu penataan lingkungan kelurahan/infrastruktur kelurahan
- Bank Sampah belum optimal
- Masih banyak perusahaan yang aktifitasnya berdampak pada lingkungan belum memiliki dokumen lingkungan
- Pelestarian LH di kawasan pesisir

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- Kurangnya kesadaran penduduk tentang arti penting dokumen kependudukan.
- Rendahnya prosentase kepemilikan dokumen kependudukan.
- Belum validnya data kependudukan (adanya data ganda dan akte sebelum tahun 2007 belum masuk database).
- Sarana gedung penyimpan dokumen belum memadai serta belum optimalnya pengelolaan dan penataan arsip/dokumen.
- Minimnya sarana dan prasarana pelayanan.
- Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM

7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- Belum optimalnya tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan, keterbatasan SDM

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, Rendahnya laki-laki untuk ber-KB, Rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya KB.
- Masih banyaknya keluarga dengan status KS dan pra KS

9. Perhubungan;

- Cakupan ketersediaan APILL masih 63%
- Cakupan ketersediaan rambu masih 84 %
- Rambu peringatan keberadaan satuan pendidikan / sekolah, zona pendidikan lebih diperbanyak untuk keamanan peserta didik.
- Penyediaan angkutan pelajar untuk pelayanan peserta didik.
- Masih terbatasnya jumlah rambu dan marka jalan
- Masih banyak kendaraan yang terlambat diujikan kembali
- Perlunya evaluasi uji jaringan trayek
- Belum terselenggaranya angkutan taksi di kab. Purworejo

10. Komunikasi dan informatika;

- Pemanfaatan media informasi masih kurang
- Masih kurangnya pengetahuan/ kemampuan SDM dalam pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public
- Belum ada aturan baku yang mengatur urusan bidang komunikasi dan informatika seperti website, hosting dan colocation, dll
- Masih belum terpenuhi/ sinkronisasi rencana induk tata kelola TIK (perpres no. 81 tahun 2010 tentang grand design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;

- Pengembangan UMKM di Purworejo perlu UKM Center
- Pendampingan UKM dari awal sampai pemasaran
- Publikasi UKM produk local.
- Lemahnya produk UMKM yang memenuhi syarat (SNI, PIRT)

12. Penanaman Modal

- Masih sedikitnya investor yang masuk purworejo
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung investasi
- Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang penanaman modal
- Kurangnya promosi penanaman modal

- Kurangnya pelayanan infrastruktur publik yang ramah investasi
- Kurangnya informasi tentang potensi investasi

13. Kepemudaan dan olah raga;

- Kurang optimalnya pembinaan pengembangan prestasi olahraga dan kepemudaan.
- Kurangnya Sarana Prasarana penunjang pembinaan dalam keolahragaan dan kepemudaan.

14. Statistik;

- Data Statistik dari Biro Pusat Statistik, sebagai lembaga yang secara resmi melakukan penerbitan data dasar. Kendala yang terjadi, beberapa update data yang diterbitkan telah melampaui tahun kebijakan, sehingga kondisi di lapangan sudah berubah.
- SKPD belum mempunyai basis data dasar pembangunan.

15. Persandian;

- Belum optimalnya penyelenggaraan persandian daerah

16. Kebudayaan;

- Belum optimalnya pelestarian cagar budaya

17. Perpustakaan

- Belum optimalnya peran perpustakaan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat
- Terbatasnya koleksi bahan pustaka untuk desa
- Teknologi belum dikuasai (tenaga otomasi perpustakaan hanya 2 orang)

18. Kearsipan.

- Pengelolaan SIMPOLAK ada masalah pada jaringan dan sarana prasarana di semua SKPD
- Pengelolaan arsip di SKPD belum optimal sesuai dengan regulasi
- Depo arsip belum representative
- Khasanah kearsipan masih minim

2.3.3. Permasalahan Pembangunan Daerah di bidang urusan pilihan adalah sebagai berikut :

1. Kelautan dan perikanan;

- SMK Kelautan, output SDM dimaksimalkan di purworejo utk program kelautan

2. Pariwisata;

- Potensi wisata religius perlu didukung jalan/infrastruktur
- Kurangnya aksesibilitas infrastruktur penunjang pariwisata
- Sumberdaya manusia dan kelembagaan pengelolaan pariwisata yang berbasis masyarakat belum terlatih
- Kurangnya promosi pariwisata yang melibatkan pihak swasta

3. Pertanian;

- Tidak ditepatinya rencana pola dan tata tanam sesuai SK BUPATI khususnya jadwal masa tanam, sehingga pemanfaatan air tidak dapat efisien.
- Belum ada pendataan dan pemetaan untuk jaringan irigasi tersier
- Belum mengarahnya pertanian berkelanjutan,
- Terkait agribisnis teknologi tepat guna sering tidak tepat sasaran, misal koropedang. pisang lebih potensial (memiliki keunggulan kompetitif)
- Agribisnis masih kurang menyengat, perlu diciptakan image bertani itu menguntungkan.
- Guramisasi lahan pertanian ,
- Optimalisasi wilayah pesisir (peningkatan nelayan tangkap)

4. Kehutanan;

- Belum optimalnya penanganan Lahan kritis

5. Energi dan sumber daya mineral;

- Isu Kedaulatan energi belum optimal ditindaklanjuti dengan penerapan energy baru terbarukan, misalnya kincir angin.

- Masih lemahnya penegakan aturan dalam penertiban pertambangan liar.
- Terbatasnya personil dibidang energi sumber daya mineral dan pendanaan yang belum memadai
- Masih kurangnya koordinasi antara instansi terkait penertiban pertambangan liar yang ada
- Diberlakukannya UU No 23 tahun 2014 Kabupaten tidak lagi mempunyai kewenangan pertambangan yang mana kewenangan ditarik menjadi urusannya provinsi.
- Masyarakat masih belum mengetahui/memahami akan pentingnya penghematan energi
- Jumlah dan ketrampilan personil yang belum memadai,
- Masih adanya kegiatan penambangan tanpa izin,
- Masih adanya kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang belum berizin atau sudah habis masa izinnya,
- Masih kurangnya sumur resapan di daerah tangkapan air,
- Belum adanya data detail dan lengkap mengenai susun yang belum berlistrik.
- Belum adanya data detail dan lengkap mengenai potensi energi baru terbarukan

6. Perdagangan;

- Distribusi arus barang dan jasa yang tidak stabil
- Kurangnya promosi perdagangan sehingga kurang dapat bersaing di pasar global
- Tertib niaga dan perlindungan konsumen sangat lemah
- Kurangnya sarpras perdagangan
- Masih banyak kondisi pasar yang rusak
- Minimnya pemasaran berbasis IT
- Lemahnya pengawasan distribusi produk
- Belum dibangunnya Pasar BALEDONO
- Belum adanya system Resi Gudang
- Pasar kurang memadai untuk perdagangan produk local
- Belum optimalnya jaringan kerjasama perdagangan

- Lembaga perlindungan konsumen masih lemah dalam menjamin kebutuhan konsumen
- Lemahnya distribusi penyediaan kebutuhan pokok masyarakat dan pemantauan harga di tingkat desa

7. Perindustrian;

- Belum adanya Rencana Pembangunan Industri
- Belum tersedianya sistem IT manajemen perindustrian
- Kualitas produk yang belum mampu bersaing dengan produk luar daerah.
- Terbatasnya SDM perindustrian terutama tenaga fungsional industri
- Terbatasnya Sarpras Pembinaan Industri
- Belum optimalnya Agroindustri
- Sulitnya mengurus perijinan dikarenakan persyaratan terlalu rumit terutama untuk industri kecil, menengah
- Sulitnya pengurusan legalitas pengolahan produk industri

8. Transmigrasi.

- Jumlah alokasi penempatan transmigrasi ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga sering tidak sesuai dengan besarnya animo/minat dari pendaftar calon transmigran.
- Sedikitnya jumlah alokasi yang diterima daerah tidak sebanding dengan jumlah calon transmigran yang terdaftar.
- Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ketransmigrasian.

2.3.4. Permasalahan pembangunan daerah pada fungsi penunjang urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan;

- Pagu indikatif agar bisa ditetapkan pada masing – masing SKPD selaras dengan program yang direncanakan.
- Kegiatan musrenbang agar tidak seremonial tapi mengkoordinir partisipasi / keinginan masyarakat.

- Perlu prioritas untuk penentuan lokasi dalam pelaksanaan pembangunan, jangan sampai ada wilayah yang tertinggal (bruno dari dulu seperti itu terus)
- Perlu sinergitas pembangunan jalan desa-jalan kabupaten-jalan nasional
- Untukantisipasi bandara kulonprogo perlu pengembangan rest area
- Perlu dibuat roadmap/blue print pembangunan infrastruktur
- Penataan kota cukup bagus tetapi kurang greget,
- Tambahan program lintas perangkat daerah yaitu Program Pengembangan Investasi, Kemitraan dan Promosi, sebagai rintisan “*Holding company*” peningkatan produk lokal
- Perlu holding company yang bisa berfungsi sebagai penyangga harga produk unggulan daerah (gabah misalnya)

2. Keuangan;

- Keseimbangan pengelolaan anggaran harus seimbang antara belanja public dan belanja rutin.
- Terkait lambatnya penyerapan anggaran infrastruktur perlu pengkajian standar harga
- Kurang optimalnya sumber-sumber pendapatan daerah

3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

- Untuk redistribusi PNS perlu dikaji ulang mulai dari anjab ABK. Dengan database ini (ANJAB , ABK yang jadi dan diupdate tiap tahun). Dapat ditindaklanjuti untuk mapping redistribusi PNS sesuai dengan formasi dan kompetensi. Sehingga tidak ada lagi SKPD besar Kabupaten asal comot tenaga potensial dari SKPD kecil. Sehingga laju pemerintahan dan pembangunan disemua lini / sector dapat berjalan lancar.
- Untuk dapat PNS yang professional dan kompeten disemua lini harus didukung dengan program kegiatan pengembangan SDM mulai dari syarat jabatan , standar kompetensi jabatan dan pola

karier yang dipahami oleh semua pihak, sehingga PNS siap untuk menghadapi arus aturan – aturan yang ada / mengikat pada proses ini.

- APBD alokasikan 5 % untuk peningkatan kapasitas SDM
- Aspek sumberdaya manusia perlu dikaji rekrutmen, penempatan, pembinaan dsb
- Sebaran pegawai pada masing – masing SKPD agar seimbang
- Birokrat agar bisa menguasai IT sehingga dapat mengakses informasi terkini.
- Fungsi komunikasi pemerintahan agar memanfaatkan fungsi humas secara baik.
- Sarana dan prasarana kerja belum memadai

4. Penelitian dan pengembangan

- Belum berkembangnya budaya inovasi di masyarakat
- Belum adanya kerangka regulasi, kelembagaan dan infrastruktur untuk mendukung SIDA

5. Pembinaan dan pengawasan

- Mendorong pembangunan infratraktur yang lebih baik maka perlu pengawasan atas kualitas jalan (pengawasan partisipatif)
- Belum optimalnya Peran APIP sebagai *consultant*, *catalyst* dan *quality assurance*
- Belum maksimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

6. Kebijakan dan koordinasi pelayanan administrasi

- Peningkatan komitmen SKPD (Pejabat & staf) dalam mengemban amanah dan tugas dan fungsinya agar tercapai peningkatan / kinerja yang diharapkan yang telah ditetapkan dalam dokumen / cita – cita / tujuan daerah
- Peningkatan profesionalisme dan kapasitas pegawai dari tingkat desa sampai dengankabupaten dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

- Good Governance merupakan impian sekaligus harapan semua masyarakat
- Upaya menciptakan aparat yang bersih dari KKN dapat diwujudkan dengan nyata.
- Masih ada penempatan pegawai yang belum THE RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE.
- Program reformasi birokrasi belum berjalan dengan baik.
- Masih ada lompatan – lompatan jabatan sehingga pada saat tertentu yang dulunya anak buah menjadi bapak buah dll karena sesuatu hal.
- Reformasi birokrasi (sesuai kapasitas dan mendorong birokrasi yang bersifat melayani)

7. Penyelenggaraan fungsi DPRD

- Terbatasnya kualitas sumberdaya aparatur baik DPRD maupun Sekretariat DPRD
- Beragamnya tingkat pendidikan dan kapasitas anggota DPRD.
- Pelaksanaan program kegiatan sering berjalan tidak sesuai dengan rencana kegiatan.
- Kurangnya pemahaman dalam menelaah suatu peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

8. Penyelenggaraan tugas-tugas camat

- Beban tugas aparatur kecamatan besar sementara jumlah aparatur kurang
- Target IMB tidak tercapai dikarenakan tidak memiliki petugas teknis layanan retribusi IMB, sementara petugas PU hanya per kawedanan
- Layanan kependudukan terutama layanan tanggapan permasalahan kesulitan
- Jangkauan layanan kependudukan untuk kecamatan yang luas perlu diperbanyak

- Regulasi penyusunan APBDes dan ADD selalu berubah-ubah sehingga memerlukan waktu untuk menyampaikan masing-masing desa
- Peningkatan layanan melalui Sistim informasi Manajemen (misal, SIMONEV, SIMDA KEU) sangat sulit untuk daerah-daerah kecamatan yang susah jangkauannya, meskipun sudah dipasang pemancar.

Berdasarkan berbagai data informasi, hasil evaluasi serta permasalahan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2015, maka isu aktual pada tahun 2017 yang diperkirakan akan dihadapi daerah serta upaya pemecahan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

No	Isu Aktual Tahun 2017	Upaya Pemecahan Permasalahan Oleh Kab/Kota	Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi Yang Dibutuhkan
	1. Produktivitas perekonomian daerah belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan produktivitas perekonomian daerah melalui sektor basisnya yaitu pertanian dalam arti luas dengan pengembangan pola agribisnis - Mendorong sektor-sektor ekonomi produktif lainnya yaitu industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata - Mendorong investasi dengan memperbaiki pelayanan perijinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan kebijakan tata niaga hasil-hasil produk pertanian maupun sarana produksi pertanian (bibit, pupuk dll) yang tidak merugikan penghasil produk pertanian - Dukungan peyediaan sarana prasarana peningkatan produktivitas sektor pertanian seperti technopark pertanian, pengembangan desa bibit dll - Dukungan kerjasam dan penyediaan sarana prasarana pengembangan potensi perikanan dan kelautan (pembangunan kawasan minapolitan) - Dukungan penyediaan sarana prasarana peningkatan produktivitas perdagangan melalui pembangunan pasar-pasar daerah - Dukungan pengembangan produk dan potensi daerah melalui berbagai kerjasama peningkatan kapasitas , pemasaran dan pembiayaan
	2. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> - Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan terintegrasi - Menanggulangi pengangguran 	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan langsung masyarakat kepada penduduk miskin yang selama ini berasal dari pemerintah pusat dan propinsi melalui berbagai skema bantuan masih sangat perlu

No	Isu Aktual Tahun 2017	Upaya Pemecahan Permasalahan Oleh Kab/Kota	Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi Yang Dibutuhkan
		dengan meningkatkan ketrampilan dan kreativitas bagi penduduk usia kerja	<p>untuk dilanjutkan kembali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan kerjasama peningkatan kapasitas penduduk usia produktif maupun bursa kerja antar daerah - Dukungan penanganan penganggur musiman melalui program padat karya
	3. Masih belum meratanya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses pendidikan berkualitas terutama pada pendidikan dasar - Meningkatkan peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga pendidik - Dukungan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar - Dukungan penyediaan sarana prasarana untuk peningkatan peran pemuda, olahraga dan pelestarian nilai-nilai budaya daerah
	4. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan penyediaan sarana prasarana untuk peningkatan jejaring sistem pelayanan kesehatan melalui pembangunan Rumah Sakit tipe C, alat kesehatan dan peningkatan kualitas puskesmas menuju pelayanan oneday care - Dukungan pembiayaan pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin
	5. Masih belum optimalnya peran ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung peningkatan produktivitas daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan ketahanan air guna mendukung peningkatan produktivitas daerah - Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar menuju universal akses - Meningkatkan interkoneksi antar wilayah guna mendukung peningkatan produktivitas daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan penyediaan sarana prasarana ketahanan air guna peningkatan produktivitas pertanian seperti embung dan groudasil - Dukungan penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan interkoneksi antar wilayah terutama kawasan perbatasan - Dukungan penyediaan infrastruktur pengembangan kawasan-kawasan strategis - Dukungan penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan potensi daerah (jalan dan jembatan menuju obyek wisata, penerangan jalan utk pasar-pasar daerah dan obyek wisata)

No	Isu Aktual Tahun 2017	Upaya Pemecahan Permasalahan Oleh Kab/Kota	Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi Yang Dibutuhkan
	6. Masih belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	- Dukungan fasilitasi dan kebijakan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup
	7. Masih belum optimalnya sistem dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik	- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	- Dukungan regulasi dan kebijakan yang dapat lebih mendorong perbaikan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik

